



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT SEMENTARA RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI**

**(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAN
KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : I (satu)
Rapat Ke : 12
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 15 September 2020
Waktu : 09.30 s.d 13.11 WIB
Tempat : Kantor/ Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
Acara : Membahas tentang:
1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020
2. RKA K/L Tahun 2020; dan
3. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI.
4. Isu-isu aktual lainnya.
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. Anggota DPR RI :
dari 37 orang 54 Anggota Komisi IV dengan rincian :
1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)
11 dari 12 orang Anggota
 1. Sudin, S.E.,/Ketua Komisi IV DPR RI
 2. H. Sunarna, S.E., M.Hum.
 3. Ir. Mindo Sianipar
 4. Ir. Effendi Sianipar
 5. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.

6. Vita Ervina, S.E., MBA.
7. Drs. I Made Urip, M.Si.
8. H. Yadi Srimulyadi
9. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
10. Maria Lestari, S.Pd.
11. Riezky Aprilia, SH., MH.
2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)
6 dari 8 orang Anggota
 1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. H.M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
 3. Budhy Setiawan
 4. Ir. Ichsan Firdaus
 5. Ir. Panggah Susanto, M.M.
 6. Alien Mus, S.H.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)
4 dari 8 orang Anggota
 1. Renny Astuti, S.H., S.PN.
 2. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess, M.Sc.
 3. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 4. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem)
2 dari 6 orang Anggota
 1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
 2. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
4 dari 6 orang Anggota
 1. Daniel Johan, S.E./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. H. Muhtarom, S.Sos.
 3. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
 4. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A
6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)
3 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Suhardi Duk, M.M.
 2. Muslim, S.HI., M.M
 3. Hj. Nur'aeni, s.Sos, M.Si.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
3 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Slamet
 2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 3. H. Johan Rosihan, S.T.
8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)
4 dari 4 orang Anggota
 1. Haerudin, S.Ag., M.H.
 2. H. Muhammad Syafrudin, S.T.,
 3. Fachry Pahlevi Konggoasa, S.E.

4. Slamet Ariyadi, S.Psi.
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)
 - 2 dari 2 orang Anggota
 1. K.H. Asep A. Maoshul Affandy, S.Sy.
 2. Ema Umiiyatul Chusnah
- A. Pemerintah:
 1. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Kuasa Menteri Kelautan dan Perikanan);
 2. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 3. Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.M. (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 4. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 5. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 6. Dr. TB. Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 7. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 8. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 9. Ir. Agus Dermawan, M.Si. (Kuasa Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 10. Berny Achmad Subki, S.T., M.Sc. (Kuasa Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan).
 11. Fatah Setiawan Topobroto, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Persero); dan
 12. Farida Mokodompit, Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kalimantan, Maluku dan lain-lain. Jadi untuk segera beliau kembali sehat menjalankan aktifitasnya saya minta Bapak Slamet mimpin doa. Silakan Bapak Slamet sebelum mulai, Slamet yang itu mah tidak jelas itu, itu Slamet Madura tidak jelas.

Silakan Bapak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak dan Ibu sekalian.

Sebagai tanda kebersamaan kita barangkali banyak di antara kita yang lagi diberikan ujian kurang sehat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Bagi yang Islam kita doakan sesuai dengan keyakinan kita dan bagi yang agama yang lain juga kita doakan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dengan menyebut Allah kita awali harakatul multan Al-Fatihah.

(MEMBACA SURAT AL-FATIAH)

Hamdan na'aimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi niamahu wayukafi mazidah. Yaa rabbana lakal hamdu kamaa yambaghi liljalali wajhikal karimi wa'adzimi sulthoik. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmih syai'un fi ardhi wa laa fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil'izzati 'amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin wal hamdulillahi rabbil'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Sebelum kita mulai saya menerima 3 pucuk surat kuasa, yang pertama di tandatangani oleh saudara Menteri KKP Edhy Prabowo kuasanya ditujukan kepada saudara Antam Novambar untuk menghadiri Rapat Kerja hari ini. Ini memang proses yang harus kita jalankan. Yang kedua, surat kuasa dari Ari Hanggono kepada Agus Darmawan karena yang bersangkutan juga belum sehat. Yang ketiga, saudari Artatiwi Widiarti memberikan surat kuasa kepada Benny Asuki untuk menghadiri Rapat Kerja hari ini.

Anggota Komisi IV DPR RI saya kira kita semua menyetujui ya surat kuasa ini, karena yang bersangkutan masih belum sehat. Insya Allah Rapat Kerja yang akan datang ketiganya dapat menghadiri Rapat Kerja.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya dalam hal ini Menteri Perikanan dan Kelautan digantikan sementara atau memberi kuasa kepada Sekjen, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, Direktur Utama Perikanan Nusantara, Direktur Utama Garam beserta hadirin yang kami hormati.

Mengawaki rapat hari ini pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa maka pada hari ini kita dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat. Sesuai dengan jadwal rapat persidangan I Tahun 2020-2021 yang telah diputuskan dalam Rapat Pengganti Bamus pada tanggal 13 Juli 2020 dan keputusan Rapat Internal pada tanggal 24 Agustus 2020, maka hari ini Selasa tanggal 15 September 2020, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan RKA K/L tahun 2021 usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI serta isu-isu aktual lainnya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Rapat Kerja ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 09.30 WIB)

Rapat Kerja hari ini kita mulai pada pukul 09.30 WIB dan akan diakhiri pada pukul 14.00 WIB. Sesuai dengan Pasal 254 Ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib atau kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap agenda kerja rapat hari ini;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Kesimpulan Rapat;
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bahwa tugas Komisi dalam bidang anggaran terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta Nota Keuangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Peraturan tentang Tata Tertib yang menjelaskan bahwa Komisi melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk membahas alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dan hasil pembahasan disampaikan kepada Badan Anggaran secara tertulis.

Jadi perlu diketahui saudara Sekjen hari ini adalah hari terakhir kami harus menyerahkan laporan ini kepada Badan Anggaran. Kalau hari ini kita tidak ada Rapat Kerja berarti tidak ada yang dilaporkan. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan Rapat Kerja pada hari ini berdasarkan surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor AG10702/DPRRI/IX/2020, tanggal 11 September 2020 hal penyampaian jadwal pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2021. Rapat Kerja hari ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 September 2020, dimana dalam kesimpulan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan revisi terhadap RKA K/L tahun 2021 sesuai dengan saran dan masukan dari Komisi IV DPR RI.

Adapun acuan anggarannya berdasarkan surat edaran bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas Nomor S692/MK02/2020 dan B636/MPPND.8/KU010108/2020 pada tanggal 5 Agustus 2020, dimana anggaran sebesar Rp6,65 triliun yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp6,49 triliun, BLU sebesar Rp32 miliar, PNPB sebesar Rp109,59 miliar, dan pinjaman luar negeri sebesar Rp12,32 miliar. Sementara itu terkait dengan Dana Alokasi Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan sebesar Rp1 triliun dengan rincian sebesar Rp350 miliar untuk provinsi, Rp650 miliar untuk kabupaten/kota.

Selanjutnya terkait dengan evaluasi tahun 2020, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan akselerasi kinerja program dan kegiatan dengan meningkatkan penyerapan anggaran secara optimal. Mengingat per 11 September 2020 capaian realisasi anggaran baru mencapai sebanyak 54,44% atau sebesar Rp2,76 triliun dari pagu sebesar Rp5,8 triliun. Agar masyarakat sektor kelautan dan perikanan dapat merasakan kehadiran bantuan Pemerintah secara cepat sesuai dengan target dan harapan.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Komisi IV DPR RI memandang bahwa kondisi Indonesia pada saat ini masih dicekam dengan pandemi COVID-19, sehingga perlu ada *alternative action* kepada pelaku yang berada di sektor kelautan dan perikanan di antaranya adalah nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengelola dan pemasaran hasil perikanan serta masyarakat pesisir agar dapat bertahan

dalam kondisi pandemi COVID-19. Sehingga Komisi IV DPR RI meminta kepada saudara Menteri Kelautan dan Perikanan untuk dapat melanjutkan program-program penyangga atau pemulihan ekonomi yang telah dilakukan sebelumnya seperti bantuan benih ikan, minapadi, bioflok, pakan ikan mandiri, gemar makan ikan, *chest freezer*, kapal nelayan, alat tangkap ikan budidaya, bakti mutu karantina, apartemen ikan atau udang, desa wisata bahari, kelompok penggerak konservasi, kelompok masyarakat mengawas, dan kegiatan lainnya sebagaimana saran dan masukan saat Rapat Dengar Pendapat.

Untuk itu Komisi IV DPR RI meminta penjelasan saudara Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan rencana kerja program dan kegiatan beserta penjelasan kriteria teknis dan menu DAK tahun 2021 yang akan menjadi ujung tombak pembangunan provinsi kabupaten/kota.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Saya juga meminta nanti saya mendapat info dari Bappenas bahwa KKP mendapatkan pinjaman cukup besar. Saya minta nanti tolong dijelaskan.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Demikian pengantar kami sampaikan, selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas.

Kami persilakan.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Bismillahirrahmanirahim.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Om swasti astu,
Namo budaya,
Salam kebajikan.*

Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan Bapak, Ibu Anggota Komisi IV DPR RI,
Serta para Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, untuk hadir di dalam Rapat Kerja sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI pada tanggal 9 September 2020. Dan kita mendoakan semoga para sahabat kita, rekan-rekan kita yang sakit segera diangkat penyakitnya, aamiin. Dan kita-kita yang ada disini semuanya kita berdoa semoga dijauhkan dari segala marabahaya, aamiin.

Bapak Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Pertama-tama ijin kami menyampaikan realisasi pelaksanaan APBN 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020. Realisasi anggaran KKP termasuk *outstanding contract* adalah sebesar Rp2,77 triliun atau 54,44% dari pagu total KKP sebesar Rp5,08 triliun. Bila dilihat berdasarkan jenis belanja realisasi belanja pegawai mencapai 65,08% dan belanja barang 42,02% dan belanja modal sebesar 39,11%. KKP akan terus melakukan percepatan penyerapan realisasi anggaran terutama untuk belanja barang dalam hal ini tim Inspektorat Jenderal akan terus mengawal setiap Eselon I dalam merealisasikan anggarannya sehingga akuntabilitasnya tetap terjaga.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Sebagaimana telah di laporkan pada Rapat Kerja yang lalu, bahwa pagu anggaran KKP tahun 2021 adalah sebesar Rp6,65 triliun terdiri atas pagu indikatif sebesar Rp5,67 triliun dan tambahan pagu anggaran sebesar Rp974,32 miliar. Sesuai dengan SEB Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S692 dan B636 tanggal 5 Agustus 2020, perihal pagu anggaran Kementerian dan Lembaga dan penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021. Sebagai tindaklanjut hasil Rapat Dengar Pendapat tanggal 9 September 2020, KKP telah melakukan penyesuaian baik penajaman program maupun revisi terhadap pagu anggaran tahun 2021, yaitu:

1. **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap** tetap sebesar Rp763,57 miliar;
2. **Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya** tetap sebesar Rp1,21 triliun;
3. **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan** bertambah Rp100 miliar sehingga menjadi Rp1,08 triliun;
4. **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan** tetap sebesar Rp431,70 miliar;
5. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut** tetap sebesar Rp455,35 miliar;
6. **Badan Riset dan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan** berkurang sebesar Rp104 miliar sehingga menjadi Rp1,52 triliun.
7. **Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan** bertambah sebesar Rp11 miliar sehingga menjadi Rp603,72 miliar.
8. **Sekretariat Jenderal** tetap sebesar Rp497,65 miliar; dan
9. **Inspektorat Jenderal** berkurang sebesar Rp7 miliar sehingga menjadi Rp86,77 miliar.

KETUA RAPAT:

Saudara Sekjen, kok dari awal saya minta Inspektorat kalau bisa jangan dipotonglah atau memang kemauan irjennya.

IRJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Dr. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Kami sudah hitung memang Rp86 miliar itu memungkinkan dengan kegiatan yang akan dikawal oleh Itjen. Jadi yang Rp 7 miliar kami berikan ke BKPM untuk bulan mutu karantina.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jangan sampai nanti dananya kurang anak buah Irjen ke lapangan dijemput, dikasih makan, dikasih hotel, mohon maaf dikasih yang bagus-bagus, pulang dikasih oleh-oleh. Nah, ini sudah tidak fair lagi nanti pemeriksaannya, saya tidak mau sampai terjadi begitu. Kemarin pun di Kementerian Pertanian saya minta juga dinaikkan anggaran Inspektorat, karena fungsinya sangat vital sekali untuk memeriksa bukan mencari kesalahan, memeriksa agar di daerah sadar bahwa kita ini dalam keadaan prihatin. Kalau dianggap cukup ya sudah tidak apa-apa.

IRJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Ketua, kalau kita bandingkan dengan menteri sebelumnya kan 78.

KETUA RAPAT:

Oke, lanjutkan Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Bapak Ketua.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Dengan demikian rancangan revisi pagu alokasi anggaran KKP tahun 2021 berdasarkan sumber dana, yaitu:

1. Rupiah Murni sebesar Rp6,49 triliun;
2. Badan Layanan Umum sebesar Rp32 miliar;
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp109,6 miliar; dan
4. Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp12,32 miliar.

Selanjutnya mohon ijin perkenankan kami menyampaikan *highlight* kegiatan prioritas unit kerja Eselon I KKP tahun 2021. Yang ini telah kami sesuaikan dengan saran dan masukan pada Rapat Dengar Pendapat yang lalu, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Ditjen Perikanan Tangkap antara lain:

- a. Pengadaan kapal perikanan dan alat penangkap ikan telah dilakukan penyesuaian, baik bahan itu dengan menyesuaikan dengan kearifan lokal.
 - b. Bantuan premi asuransi nelayan.
 - c. Fasilitas sertifikat hak atas tanah nelayan;
 - d. Pembangunan atau rehabilitasi pelabuhan perikanan;
 - e. Kampung nelayan maju, ini juga telah dilakukan penyesuaian dengan masukan dari Rapat Dengar Pendapat yang lalu;
 - f. Operasional SKPT dan fasilitas pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi dan bertaraf internasional yang telah dilakukan juga penyesuaian; serta
 - g. Penambahan lokasi untuk kegiatan bakti nelayan.
2. Kegiatan prioritas Ditjen Perikanan Budidaya, antara lain:
- a. Kegiatan bantuan benih dan calon induk, ini juga sudah dilakukan penyesuaian;
 - b. Penambahan kegiatan pengadaan mesin penyedot lumpur, mina bakti, bioflok, eskavator, pengolahan irigasi tambak atau kolam, kebun bibit rumput ikan laut, mesin pakan dan bahan baku pakan mandiri, KJA budidaya laut, percontohan cluster kawasan tambak udang, *milenial screem farming*, dan DED yang telah juga dilakukan penyesuaian, asuransi usaha budidaya dan penyesuaian pada produksi pakan mandiri di UPT.
3. Kegiatan prioritas Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, antara lain:
- a. Pembangunan *portable cold storage*, yang dulu *portable* dilengkapi dengan mesin *air blash freezer* untuk membekukan ikan. Ini juga disesuaikan dari semula pembangunan *integrated cold storage*.
 - b. Penambahan pembangunan pabrik es balok kapasitas 20 ton. Yang lalu bukan pabrik es balok.
 - c. Mobil berefrigasi;
 - d. Pasar ikan dan sentra kuliner yang telah juga hasil dari penyesuaian;
 - e. Penambahan lokasi kegiatan kampanye gemar makan ikan.
4. Kegiatan prioritas Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, antara lain:
- a. Pengelolaan kawasan konservasi, telah dilakukan penyesuaian;
 - b. Penambahan bantuan kepada Kompak (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi);
 - c. Dermaga apung;
 - d. Rehabilitasi kawasan mangrove juga telah dilakukan penyesuaian mengingat KKP dalam pengadaan bibit mangrove membeli dari masyarakat tidak diproduksi oleh UPT;
 - e. Pengembangan usaha garam rakyat;
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana niaga garam rakyat yang telah dilakukan penyesuaian;
 - g. Penambahan lokasi pembangunan sarana dan prasarana desa wisata bahari; dan
 - h. Penyusunan rencana zonasi.

5. Kegiatan prioritas Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, antara lain:
 - a. Operasional kapal pengawas, pesawat patrol, *speedboat* dan pusdal;
 - b. Pembangunan kapal pengawas dan penambahan 1 unit kapal pengawas tipe B mengingat KKP memerlukan kapal berukuran besar;
 - c. Pembangunan bangunan pos pengawas, pemeliharaan kapal pengawas dan operasional pengawasan.

6. Kegiatan prioritas Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yaitu:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan vokasi;
 - b. Sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. Pelatihan masyarakat;
 - d. Penyuluhan;
 - e. Sarana dan prasarana pelatihan dan penyuluhan;
 - f. *Stock assessment* dan riset kelautan perikanan pengolahan produk bio teknologi dan sosial ekonomi.

7. Kegiatan prioritas Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, antara lain:
 - a. Pelayanan sertifikasi dan pengawasan karantina;
 - b. Sertifikasi dan pengawasan mutu hasil perikanan;
 - c. Penerapan sistem manajemen mutu berstandart internasional;
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan karantina dan mutu hasil perikanan;
 - e. Pengawasan di perbatasan dan penambahan lokasi kegiatan bulan mutu karantina.

8. Kegiatan prioritas Sekretariat Jenderal tahun 2021, antara lain akan digunakan untuk:
 - a. Kegiatan layanan penyiapan produk hukum dan penataan organisasi;
 - b. Pengelolaan sumber daya aparatur;
 - c. Pengelolaan keuangan;
 - d. Pengelolaan perencanaan;
 - e. Pengelolaan administrasi dan pengadaan barang dan jasa;
 - f. Pengelolaan Humas dan kerja sama luar negeri;
 - g. Pengelolaan data statistic dan informasi;
 - h. Operasional BLULPMUKP dan kegiatan dekonsentrasi di 34 provinsi.

9. Kegiatan prioritas Inspektorat Jenderal, antara lain pengawasan akuntabilitas mitra Inspektorat I sampai dengan IV dalam pelaksanaan pembangunan kelautan perikanan

Bapak Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami muliakan.

Terkait dengan pinjaman luar negeri dapat kami laporkan, bahwa terdapat 3 program yang diusulkan pendanaannya melalui pinjaman atau loan, yaitu:

1. Pengembangan pelabuhan perikanan di lingkaran luar, rencana pinjaman dari AFD Francis;
2. Infrastruktur kawasan terumbu karang laut sejahtera atau Insan Terang Lautra, rencana pinjaman dari World Bank;
3. Peningkatan infrastruktur untuk budidaya udang, rencana pinjaman dari ADB.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami muliakan.

KETUA RAPAT:

Saudara Sekjen, kalau bisa tolong disebutkan angkanya biar kami bisa menghitung untuk sebagai fungsi pengawasan.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Bapak Ketua.

Usulan pinjaman luar negeri tahun 2021-2024 ini sudah usulan pinjamannya sudah mendapat *tentative lender*. Unit DJPT *tentative lender*-nya AFD, kegiatannya pengembangan pelabuhan perikanan lingkaran luar besarnya pinjaman.

KETUA RAPAT:

Ini kalau tidak salah 3 unit pelabuhannya, mana Dirjenya?

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Untuk lokasinya PPS Belawan, ada 4 Pak, PPS Belawan, PPS Bitung, PPS Kendari dan PPS Sungai Liat, 105.350.000 US Dolar Untuk PRL dari World Bank untuk lokasi ada di 7 provinsi, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara dan NTT. Yang kedua, 3 WPPNRI percontohan di 714, 715, 718. Yang ketiga, kawasan konservasi perairan nasional Laut Sawu, lalu yang terakhir kawasan konservasi perairan daerah besarnya 75 juta Dolar.

Untuk DJPB dari ADB dengan maksud peningkatan infrastruktur untuk budidaya udang, jumlah besarnya 93 juta US Dolar. Untuk daerahnya ada di 7 daerah, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, saya ulangi untuk Banten daerah Tangerang, Jawa Tengah di Jepara, Jawa Timur di Pasuruan dan Situ Bondo, Sulawesi Selatan di Takalar dan Pinrang, untuk Bali di Karang Asem, untuk di Aceh, Aceh Besar. Saya ulangi pinjamannya sebesar 93 juta US Dolar.

Bisa dilanjut Pak Ketua?

Terima kasih.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Dalam kesempatan kami juga melaporkan usulan tambahan pagu alokasi anggaran KKP tahun 2021 sebesar Rp3,28 miliar. Kemungkinan salah ini ya, Rp3,28 triliun berdasarkan surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B451/MENKP/VII/2020, tanggal 25 Agustus 2020 untuk pembangunan sentra industry kelautan dan perikanan terpadu di Natuna Utara dan Maluku dalam rangka mendukung lumbung ikan nasional.

Perluasan program gemar ikan, penyusunan rencana zonasi, pendataan, pembangunan war room dan media center KKP. Dapat kami laporkan bahwa masih terdapat usulan yang belum tertampung dalam pagu anggaran tahun 2012, yakni untuk pembangunan sarana dan prasarana wisata bahari yang berdasakan surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B326/MENKP/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020 diusulkan sebesar Rp200 miliar.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Kriteria teknis (DAK) Dana Alokasi Khusus bidang KP untuk Provinsi, yaitu:

1. Sentra produksi kelautan dan perikanan;
2. Rencana induk pelabuhan perikanan nasional;
3. Status penetapan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil;
4. Tingkat kerawanan illegal unreported and unregulated (IUU) *Fishing*;
5. Provinsi bercirikan kepulauan;
6. Status penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP3K;
7. Arahan Presiden amanat Perpres dan 8 kawasan Indonesia bagian timur.

Sedangkan kriteria teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KP untuk Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Sentra produksi perikanan;
2. Jumlah nelayan pembudidaya pengolahan dan pemasar hasil perikanan;
3. Perhatikan lokasi kabupaten afirmatif, tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar;
4. Kawasan Indonesia bagian timur dan memperhatikan focus-focus pengembangan kelautan dan perikanan.

Berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor 229/PK/2020 tanggal 4 Juni 2020, dari total alokasi pagu Dana Alokasi Khusus tahun 2021 sebesar Rp65,25 triliun. Dana Alokasi Khusus bidang kelautan perikanan mendapatkan alokasi sebesar Rp1 triliun, terdiri atas DAK KP Provinsi sebesar Rp350 miliar dan Kabupaten/Kota sebesar Rp650 miliar.

Secara garis besar terdapat 7 menu kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh provinsi dan 4 menu kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Adapun target output DAK bidang KP untuk Provinsi tahun 2021 berdasarkan usulan dari daerah yang telah masuk dalam aplikasi, yaitu:

1. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di 59 pelabuhan perikanan;
2. Pembangunan dan rehabilitasi 30 unit pembenihan;
3. Pembangunan atau rehab pengadaan sarpras kawasan konservasi di 35 kawasan konservasi;
4. Pembangunan rehabilitasi sarpras kelautan di pesisir dan pulau-pulau kecil di 41 pulau-pulau kecil atau pesisir;
5. Pengadaan sarpras pengawasan sebanyak 17 unit dan 219 paket pengawasan;
6. Sarpras garam rakyat berupa satu paket pembangunan gudang garam 100 ton, 15 unit revitalisasi Gudang garam rakyat sebesar 100 ton, 118 paket rumah tanel garam, 5 lokasi integrasi pergaraman antara 8-15 hektar; dan
7. Percontohan budidaya laut sebanyak 276 paket.

Sedangkan target output Dana Alokasi Khusus bidang KP untuk Kabupaten/Kota tahun 2021, yaitu:

1. Pembangunan atau rehab 164 unit pembenihan;
2. Pengadaan 2.032 kapal 5 GT, 11.589 alat penangkap ikan dan 10.139 alat bantu penangkap ikan;
3. 2.411 paket pembudidayaan ikan;
4. Rehabilitasi sarpras pengolahan dan pemasaran berupa dua pabrik es, 3 *cold storage*, 19 pasar ikan, dan 104 UP Mikro.

Selanjutnya berdasarkan data sementara berdasarkan aplikasi Krisna dana Alokasi Khusus per 25 Agustus 2020 dapat kami laporkan jumlah Provinsi dan jumlah Kabupaten/Kota yang memilih menu Dana Alokasi Khusus tahun 2021 sebagai contoh untuk menu pembangunan dana rehab sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di pilih oleh 31 provinsi sesuai dengan prioritas daerah. Menu pembangunan atau rehabilitasi unit pembenihan dipilih oleh 24 provinsi dan seterusnya.

Demikian pula untuk kabupaten/kota menu pembangunan rehabilitasi unit pembenihan dipilih oleh 163 kabupaten/kota. Menu pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil dipilih oleh 218 kabupaten/kota dan seterusnya. Kami akan sampaikan laporan lengkap setelah semua daerah menyusun rencana kegiatan pada November 2020.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami muliakan.

Ijinkan kami juga melaporkan realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP KKP. Sampai dengan tanggal 7 September 2020 mencapai ini baru sampai baru tercapai Rp560,3 miliar yang terdiri dari penerimaan sumber daya alam sebesar Rp415,4 miliar dan non sumber daya alam sebesar Rp111,9 miliar dan BLU sebesar Rp33 miliar. Di samping itu kami juga melaporkan realisasi penyaluran dana kelola BLU LPMUKP sampai

dengan September 2020 telah mencapai Rp546,89 miliar untuk 17.482 orang pemanfaat.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Demikian yang dapat kami sampaikan pada Rapat Kerja kali ini. Seluruh saran, masukan dan rekomendasi dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan KKP. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi IV DPR RI yang sangat besar kepada KKP dan mohon persetujuan lebih lanjut terhadap RKA K/L KKP tahun 2021.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om santi-santi om,
Namo budaya,
Salam kebajikan.

KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih Bapak Sekjen yang menjadi kuasa penuh dari Menteri KKP pada hari ini yang telah menyampaikan paparannya. Dan kita sudah bisa memahami secara utuh paparan itu dan tentunya masih ada hal yang bisa di sampaikan dalam bentuk koreksi atau bahan perbaikan atau perubahan. Minimal dari saya pribadi walaupun kemarin sudah ada kesepakatan internal Pimpinan, yang pasar modern agar di kembalikan kembali nanti secara teknis jam 12.00 WIB kita bahas teknis dari sisi mana yang bisa digeser kesana. Nantikan jam 12.00 WIB Bapak Ichsan kita ada pembicaraan dengan Pimpinan.

Untuk itu, pasar modern jangan lupa. Untuk itu, dimulai dari sebelah kanan saya sebenarnya sudah dilarang untuk masuk kantor lebih baik tinggal di rumah, menulis, mengikuti secara virtual, ngemong cucu, menikmati di usia relative sudah menuju muda kembali dengan honor yang cukup professor ini. Tetapi kecintaannya sama KKP kayaknya tinggi, dia berani melawan corona. Dan kita mulai dari sebelah kanan saya dulu pernah menjadi penyanyi terkenal adiknya Endang S Torina, kalau ini Endang S Thohari.

Terima kasih.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bapak Ketua Dedi yang cukup kocak dan menyenangkan.

Bapak Sudin Ketua kami yang saya banggakan,

Bapak Sekjen dan Bapak Dirjen yang saya hormati dan saya banggakan.

Kami punya beberapa evaluasi yaitu tentang evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2020. Jadi pada laporan penyerapan anggaran KKP 2020 per unit kerja dengan serapan rata-rata kira-kira 54,5 per 11 September 2020. Hal ini menunjukkan bahwa dalam waktu yang dekat ini harus menghabiskan lagi 46,5 lagi. Nah, apakah bisa memaksimalkan sesuai dengan target.

Yang kedua, ada catatan tentang budidaya yang penyerapan anggarannya juga masih sangat rendah di bawah 40%. Padahal kami di Dapil di Bogor dan Cianjur sangat mengharapkan budidaya-budidaya dengan benih-benih yang unggul terutama benih-benih yang untuk diekspor. Dan kami sudah mencatat jenis benihnya mudah-mudahan bisa diakomodir, yaitu ada ikan red lizard, kemudian ikan brushmouth yang sangat diperlukan di luar negeri dan kita bisa mengekspor.

Kemudian yang ketiga, serapan realisasi anggaran pada program-program yang memiliki dampak secara langsung kepada masyarakat luas. Nah, mohon hari ini bisa diantisipasi atau didorong karena nilai tukar NTPI yang mengalami deficit hampir 70% di semua provinsi di Indonesia.

Nah, berikutnya tentang RKA K/L KKP tahun 2021. Jadi tadi Bapak Ketua, sudah menjelaskan tentang pasar bersih dan modern. Mohon bisa dialokasikan karena memang gemar ikan kalau tidak diikuti pasar yang bersih akan mubazir, karena tadi pasarnya sering kumuh dan juga baunya yang menyengat. Nah, kemudian untuk rancangan pagu alokasi tahun 2021 terutama kami harapkan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, kami sudah forward ke Sekjen atau ke Badan SDM ini, bahwa ada beberapa temuan dari Ikatan Alumni Prancis, tentang karet yang bisa dibuat kapal yang jauh biayanya lebih murah. Nah, Ikatan Alumni Prancis ini sudah dipatenkan oleh BPPT, jadi mohon bisa ditindaklanjuti. Yang kedua dari UGM tentang makanan yang sehat, yaitu saya sudah forward-kan juga sebetulnya Ibu Tety akan menindaklanjuti tetapi karena beliau sakit jadi mohon bisa ditindaklanjuti untuk dipresentasikan dan dikelola bersama karena cukup sederhana metodenya.

Kemudian untuk Ditjen Perikanan Tangkap, disini ada fasilitas kredit perikanan tangkap dan juga ada BLU. Nah, mohon bisa dijelaskan. Kemudian bantuan kapal yang 5 GT yang semula 125 unit menjadi 100 unit, nah ini mohon diprioritaskan ke wilayah-wilayah pesisir yang masih banyak kekurangan serta spesifikasi disesuaikan dengan keadaan laut setempat. Jadi jangan ada standarisasi sehingga semua disamakan.

Kemudian untuk Perikanan Budidaya, bantuan bioflok sebanyak 304 unit, mohon bantuan ini difokuskan bagi wilayah-wilayah yang kesulitan mengakses sumber daya protein. Dan kami juga sudah mengemas untuk anti stunting. Nah, jadi mohon ada tindaklanjutnya karena sudah disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik dan sudah dilaunching oleh Bapak Dirjen dan Ibu Dirjen.

Kemudian yang ketiga Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, kami cukup mengapresiasi namun di 233 lokasi ini mohon ditambahkan menjadi beberapa lokasi yang belum tercatat di Dapil kita masing-masing. Kemudian Pengelola Ruang Laut, kami terus mendorong KKP untuk bisa mengekspor. Nah, kami juga ingin ada percontohan untuk udang-udang yang bisa dikelola secara tadi apartemen ataupun di ruang-ruang khusus. Nah, permasalahan yang tidak kalah menariknya adalah abrasi Pak. Jadi mohon abrasi ini bisa diprioritaskan terutama di pelabuhan Kejawan Pak, kebetulan saya lahir di sana. Nah, jadi di sana kelihatan sangat kumuh sekali Pak, padahal dulu waktu kami hibahkan tanah-tanah tersebut itu hijau Pak, penuh dengan mangrove. Nah, jadi mohon direhabilitasi kembali.

Nah, kemudian Badan Riset Sumber Daya. Jadi saya sangat kagum karena dulu pernah mati suri selama 5 tahun sekarang sudah hidup kembali. Jadi mohon para peneliti-peneliti yang sudah aktif dari perguruan tinggi bisa diundang ke KKP, karena ini merupakan insentif bagi mereka, penghargaan bagi mereka bahwa KKP sekarang sudah memperhatikan penelitian-penelitian. Namun, kalau tidak diundang mereka mati suri lagi Pak, khusus dari UGM, UNDIP dan beberapa perguruan tinggi yang lain.

Kemudian Badan Karantina Ikan, kami juga sangat apresiasi mudah-mudahan pengawasan di wilayah perbatasan mulai dikembangkan lagi karena ada 41 lokasi dengan anggaran Rp45.122.000.000 per lokasi mudah-mudahan bisa memaksimalkan pengawasan ini. Demikian Bapak dan Ibu sekalian.

Kemudian yang lain adalah dana Inspektorat Jenderal tadi sudah dikemukakan oleh Bapak Ketua kita. Dan Dana Alokasi Khusus, saya khawatir ini Pak, khawatirnya Pemda-nya tidak komit. Nah, jadi mohon ada tim yang mengawasi Dana Alokasi Khusus. Karena pada kenyataannya dilapangan gubernur atau walikotanya tergantung dari top down policy. Nah, jadi mohon hal itu bisa diantisipasi dengan visi dan misi melindungi para nelayan kita yang kehidupannya semakin berat.

Nah, untuk detailnya Pak, kami sudah mencatat untuk Dapil Kota Bogor dan Cianjur sesuai dengan kemampuan yang bisa dikembangkan disana karena kami juga mempunyai ahli tentang penyebaran ikan yang bisa diekspor jadi kami akan serahkan kepada Bapak.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Endang yang mewakili Anggota Komisi IV DPR RI juga Fraksi Gerindra Di Komisi IV DPR RI. Jadi sekarang yang bertanya representasi Fraksi Pak, jadi kita batasin jadi Bapak bisa jam 13.30 WIB sudah istirahat di rumah, kalau di kantor dinilai berbahaya.

Baik, dan orang Aceh itu ada gen dari India, ada gen dari Portugis, kalau Portugis pasti bule, hidungnya mancung, tinggi, India manis-manis. Nah, kalau di samping kanan saya ini kayaknya perpaduan kedua-duanya, manisnya kayak orang India, kemudian gantengnya kayak orang Portugis, tapi agamanya Islam sehingga menjadi seorang Muslim. Jadi silakan Pak, videonya sudah siap Pak, *Insyallah* nanti tinggal posting. Bicara yang manis-manis agar konstituen Bapak makin cinta sama Bapak.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih Kang Dedi yang baik hati, yang setiap hari kita lihat postingan luar biasa. Saya ngikutin terus perkembangan media sosial Kang Dedi.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.

Pimpinan serta Anggota Komisi IV DPR RI,
Bapak Sekjen serta jajaran KKP.

Pertama, tentu menyangkut realisasi serapan Pak Sekjen tadi kita sudah sama-sama lihat per 11 September sekitar 54,4%. Di sini saya juga melihat ada Dirjen PB itu yang masih 45,7% ini kita berharap ini semua Dirjen-dirjen ini bisa maksimalkan penyerapan anggaran, karena kalau kita lihat waktu kan tinggal 4 bulan lagi ini Bapak Sekjen. Ini kita harapkan bisa lebih maksimal.

Yang kedua Bapak Sekjen, kita bisa melihat juga disini menyangkut PNBK Kelautan dan Perikanan. Kalau kita lihat kalau saya tadi sangat mendukung, tapi kalau disisi lain kita melihat menyangkut pajak ekspor ini belum ditampilkan ini Bapak Sekjen. Ini sebenarnya yang kita tunggu-tunggu ini sejauhmana sih PNBK kita di sektor ekspor kita, kenapa? Karena kalau kita lihat hari ini di tahun 2019 kan mencapai Rp756,7 miliar sementara di tahun 2020 itu baru mencapai Rp560 miliar. Ini saya pikir juga bisa menjadi masukan kepada Bapak Sekjen ini kira-kira apa sih penyebabnya, apakah karena dampak pandemi ini tentu kita harapkan ini bisa terus digenjut sehingga PNBK di sektor perikanan ini bisa kita harapkan lebih maksimal dibandingkan tahun 2019.

Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan saya lihat Dirjen Tangkap ini, mana Bapak Dirjen lagi ke toilet ya. Dirjen Tangkap ini Bapak Sekjen, saya melihat tadi sudah disampaikan Ibu Endang menyangkut pengadaan kapal yang ukuran 5 GT sebenarnya ini sangat diharapkan oleh masyarakat.

Namun demikian, ini memang kita lihat ini ada pengurangan anggaran dari 125 menjadi 100. Kita harapkan ini bisa dimaksimalkan.

Yang kedua, tentu berkait dengan pembangunan rehabilitasi pelabuhan perikanan. Ini saya berharap nanti waktu itu sama Kang Dedi kita sudah mengunjungi Banda Aceh, yaitu Pelabuhan Ulele Banda Aceh, kemudian juga sama Bapak Slamet, Bapak Dirjen kita juga mengunjungi Pelabuhan IDI ya, ini Bapak Dirjen Tangkap. Ini artinya bahwa kita berharap apa yang kita kunjungi itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ini Bapak Dirjen. Mereka berharap ada pengerukan di 2 pelabuhan perikanan di Aceh itu memang tidak terlalu besar anggarannya, tapi sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena itu menyangkut sekian ribu kapal-kapal nelayan disitu Bapak Dirjen, tolong dicatat Bapak Dirjen yang satu Lampulo itu di Banda Aceh dan satu lagi Pelabuhan IDI. Karena waktu itu karena ini biasa pertanggungjawaban kita. Kita sudah mengunjungi, masyarakat sudah menanti-nanti jangan sampai ini di 2021 tidak bisa kita realisasikan, karena itu menyangkut hajat hidup ribuan nelayan disana.

Kemudian yang menyangkut Dirjen Budidaya Bapak Slamet ya. Bapak Slamet ini saya pikir ini sangat konsen di bidang budidaya yang kemarin terima kasih juga Aceh Timur sudah dijadikan sebagai pilot project percontohan. Namun demikian, tentu kita bicara budidaya ini tidak sebatas itu Bapak Slamet. Kita harapkan dukungan yang diharapkan oleh masyarakat khususnya di daerah pesisir ini bagaimana revitalisasi tambak-tambak ini kita bisa maksimalkan sejalan dengan semangat Bapak Menteri, hari ini bicara misalnya salah satu udang Paname ini. Kalau sebagian kita lihat kan keberhasilan luar biasa Bapak Slamet, tapi sebagian lagi masyarakat masih takut. Kenapa? Karena trauma kadang-kadang sekali berhasil lima kali tidak berhasil, ini tentunya kita berharap ada pendampingan, ada pelatihan, ada Kursus-kursus yang dilaksanakan oleh Dirjen Budidaya Bapak Slamet. Jadi sehingga berapa pun program yang kita kucurkan kepada masyarakat itu output-nya maupun outcome dapat Bapak Slamet. Sehingga hari ini mereka mungkin 1 hektar hanya menghasilkan 3 ton, kita harapkan berikutnya bisa 5 ton, bisa 10 ton, bahkan di beberapa daerah sudah sampai 10 ton. Ini kita harapkan kalau ini dilaksanakan oleh Kementerian KKP saya yakin ini bisa memberikan kontribusi terbesar buat para nelayan.

Kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan Dirjen PDS. Mungkin Bapak Sekjen bisa sampaikan ini salah satu masih punya hutang Dirjen PDS ini ya. Ini salah satu waktu itu ada program ATI (Alih Teknologi) Pak. Hari ini bukan saya saja Pak, ada beberapa teman-teman yang sudah hadir ke daerah dan sudah menyerahkan secara simbolis kunci mobil ini kepada bupati atau masyarakat di daerah Pak Sekjen. Artinya, jangan sampai di 2021 ini tidak dianggarkan, karena harusnya 2020 itu sudah diserahkan kepada masyarakat. Sampai hari ini saya dipertanyakan oleh Bupati, khususnya di Aceh Utara yang kita turun itu ada sekitar 1.500 orang hadir dan Bupati Langkap hadir dan kita sudah menyerahkan waktu itu juga masih Dirjenya Bapak Agus ya, sudah saya sampaikan kepada Ibu Dirjen baru lagi kurang sehat juga. Ini mudah-mudahan saya harapkan harus clear Pak Sekjen, kalau tidak jadi hutang buat kita. Tadi saya tanya juga Bapak Rudi Dapil NTB juga

belum terealisasi ini, ini mudah-mudahan hutang kita, kita bereskan Pak Sekjen jangan sampai menjadi hal yang negative buat kita semua.

Mungkin itu beberapa hal Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih Bapak Muslim yang telah menyampaikan secara komprehensif apa yang menjadi keinginan konsituennya dan sudah terekam dengan baik tinggal diposting saja Pak.

Setiap doa itu selalu yang dimohon dua, satu punya rezeki dan dua hidupnya selamat itu saja, selamat dunia dan selamat akhirat. Di Komisi IV DPR RI itu ada Rezky, ada Slamet, bahkan Slametnya ada dua kalau tidak salah. Tadi Bapak Slamet sudah berdoa untuk keselamatan dan kesehatan Bapak Menteri, sekarang Bapak Slamet juga akan meminta kembali untuk rezeki dan keselamatan rakyat yang diwakilinya. Silakan Bapak Slamet, sekaligus juga representasi dari Fraksi PKS.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Bapak Ketua.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Rapat, rekan-rekan Anggota Dewan, Bapak Sekjen beserta seluruh jajarannya.

Beberapa hal yang ingin kita klarifikasi dan juga penjelasan. Yang pertama, tentunya mengingatkan realisasi anggaran yang 54% mudah-mudahan kalau sudah ada uangnya segera bisa direalisasi, karena tinggal beberapa bulan. Catatannya kalau ada uangnya Bapak Sekjen, kalau tidak ada uangnya juga bagaimana mau realisasi.

Yang berikutnya, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan anggaran. Di Ditjen Daya Saing, nanti kalau saya salah juga ini mohon dikoreksi. Kalau tidak salah *integrated cold storage* itu kan kesepakatan Rapat Dengar Pendapat direalokasi. Di jadikan *portable cold storage*. Kalau disitu ada nilai 80 sementara saya lihat di programnya itu di *portable cold storage* itu ada Rp52,5 miliar. Artinya, kira-kira kurang lebih masih ada Rp30 miliar apakah kemudian tidak dijadikan kembali kepada *portable cold storage*,

karena memang kajian kita ini yang mendatangkan atau lebih memberikan manfaat kepada para nelayan kita.

Kemudian juga sentra kuliner, itu disitu ada 11 unit. Pak Ichsan kalau tdiak salah kemarin ingin diperbanyak Bapak Ichsan gitu ya di Rapat Dengar Pendapat. Nah, ini nanti mungkin bisa diklarifikasi. Kemudian saya masih menyoroti terkait dengan besarnya anggaran di Ditjen Perikanan Budidaya, yaitu data dan infomasi itu teralokasikan sekitar Rp9,2 miliar. Ini mungkin bisa dijelaskan data informasi yang seperti apa sehingga anggarannya sangat besar. Dan catatan saya di Rapat Dengar Pendapat kemarin juga sama terkait dengan beberapa Ditjen yang mempunyai program yang sama dalam rangka big data KKP. Catatan saya ada Ditjen Pengelolaan Ruang Laut ada 2,4 kemudian Ditjen Perikanan Rp4 miliar. Kalau pun toh memang itu dibutuhkan saya ingin mendapatkan gambaran juga KPI (Key Performance Indicator) dari ini apa. Jadi secara prinsip data itu dibutuhkan hanya kemudian setiap Ditjen ini butuh anggaran untuk itu data yang kayak apa yang ingin disampaikan dalam big data. Dan saya ingin mendapatkan KPI dari kegiatan ini untuk 2021, sehingga nanti di 2021 kita akan bisa ukur seberapa capaian dari kegiatan ini, karena inikan sifatnya kuantatif, sehingga kalau KPI disampaikan kita di awal nanti di akhir 2021 kita bisa evaluasi. Dan juga mungkin Bapak Slamet untuk UPO 2020 ini ceritanya bagaimana, beberapa saya dengar sudah ada yang cair tapi ada yang belum. Minimal di Dapil saya UPO juga tidak ada ini. Itu saja, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Di Sukabumi tidak ada UPO mungkin UPO-nya lagi mendarat dulu Pak, di daerah benua Afrika itu atau America itu, kan suka UPO turun katanya, tetapi ternyata UPO disini beda lagi. UPO ini urusannya dengan program-program di Kementerian KKP.

Nah, selanjutnya ini mantan bupati dua periode mungkin nanti tiga periode dan empat periode dengan keluarga berikutnya. Berhasil membangun system pengelolaan perikanan laut yang memadai, punya pengalaman melaut dan sekarang memang lagi punya pengalaman mendarat di Jakarta. Nah, dan senantiasa mengabdikan kepada Allah SWT sesuai dengan namanya yaitu Abdullah Tuasikal. Saya tidak tahu kalau Tuasikal apa artinya, kalau menurut saya sih bukan tua ini masih muda selalu.

Silakan Pak.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan, rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI,

Bapak Sekjen, para Dirjen beserta jajarannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Apa yang disampaikan oleh Bapak Ditjen dipresentasikan, saya kira materi-materinya sudah jelas dan kita sudah masuk pada Rapat Kerja. Dan mungkin kegiatan-kegiatan anggaran pun sudah akan disusun. Kami mewakili Dapil dan tentunya apa yang kami wakili itu pasti kami akan pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat pesisir di Maluku sangat cukup banyak, kurang lebih di atas 70%. Yang kita bangun sekarang adalah kegiatan-kegiatan industry dan kegiatan-kegiatan industry ini belum terjawab kepentingan-kepentingan masyarakat ada di bawah. Untuk itu, saya lihat di Ditjen Perikanan Tangkap, tinggal dilihat saja inikan kegiatan, anggaran juga harus berkeadilan. Kami tidak harus masukan ke seluruh program, tapi programnya harus sesuai dengan kearifan local yang ada disana. Kami lihat disini seperti fasilitas penataan sentra kampung nelayan, ini juga tidak ada bahkan usaha keluarga nelayan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Coba dibuka nanti karena anggarannya itu belum mungkin belum diketok kami harap agar wilayah kita ini juga menjadi prioritas. Di Budidaya pun hampir sama nanti karena ini waktu sudah sempit, kita waktu sampai 13.30 WIB tinggal saya kira penyesuaian saja.

Yang terakhir, singkat saja bahwa pada saat Rapat Dengar Pendapat kemarin kami juga ada masukan di kegiatan Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2021, ada 10 soal study kelayakan terkait dengan pelabuhan perikanan terintegrasi dan bertaraf internasional. Kemarin waktu kita usulkan menurut Bapak Dirjen Tangkap bahwa itu harga sekitar kurang lebih Rp1,5 triliun. Saya kira kalau Rp1,5 triliun itu soal untuk lumbung ikan nasional. Tapi kalau untuk study kelayakan saya kira awalnya Rp1 miliar ini sudah dirubah menjadi Rp500 juta. Saya kira di 6 lokasi ini saya harapkan itu agar satunya adalah Maluku untuk pelabuhan terpadu.

Saya kira itu saja Pak Sekjen, saya harapkan agar hari ini pelabuhan terpadu skala internasional ini mudahan-mudahan Maluku masuk di 6 wilayah yang menjadi program. Saya kira demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Abdullah Tuasikal.

Selanjutnya Ibu kita, biasanya sebelah sana duduknya kenapa pindah kesini, saya nyari kesana kok ada disini. Ibu Ema, Ema itu sudah Ibu.

F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,
Bapak Sekjen beserta jajaran yang hadir.

Salam sehat semuanya, semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT, aamiin.

Ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan, yang pertama kepada Dirjen Penguatan Daya Saing Produk. Terkait dengan program penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan, kami berharap volume program ini ditingkatkan dan mengenai sasaran programnya difokuskan kepada kalangan milenial. Mengapa menurut kami program ini harus ditingkatkan sebagai langkah membangkitkan kembali sektor UMKM bidang perikanan dan pemulihan kondisi ekonomi akibat pandemic.

Yang kedua, kepada Dirjen Perikanan Budidaya. Untuk program Mina Padi yang nanti diberikan kepada provinsi Jawa Timur, khususnya Dapil kami agar alokasi potensial kegiatan Mina Padi. Mengingat Jawa Timur termasuk wilayah lumbung pangan padi nasional. Program Mina Padi memang sangat diharapkan oleh petani. Program ini merupakan program usaha tani untuk mendorong system pertanian organik dan pengendalian hama terpadu sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktifitas pangan.

Yang kedua, sama seperti Bapak dan Ibu yang tadi sudah disampaikan terkait dengan serapan anggaran yang masih minim di bawah 50%. Kami berharap untuk di kuwartal III ini segera direalisasikan terutama program-program yang menjadi aspirasi dari Anggota Komisi IV DPR RI dari Ditjen Perikanan Budidaya ini belum maksimal dan memang belum turun seperti apa yang kemarin kami sampaikan kembali bahwa untuk program bantuan benih dan pakan, pakannya sudah datang, benihnya sampai sekarang Pak, belum sampai. Saya dihubungi oleh konsideran kami calon penerima bantuan saya jawabnya benihnya masih OTW, saya bilang seperti itu Pak. Jadi mohon diperhatikan kalau memang ini karena sudah kuwartal III ini kami juga berharap apa seperti yang disampaikan oleh Ibu Endang apakah bisa terserap sampai 100% karena sudah masuk di kuwartal III. Jadi mohon untuk diperhatikan.

Yang selanjutnya kepada Kepala Badan Karantina Ikan. Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2021, kami untuk anggaran tahun 2021 kami mencermati pagu anggaran untuk kegiatan BKIPM lebih banyak di alokasikan untuk dukungan manajemen internal. Sementara total alokasi untuk kegiatan karantina, standarisasi system dan kepatuhan serta pengendalian mutu jumlahnya kurang dari separuh total rancangan APBN di BKIPM sendiri. Kami ingin penjelasan mengapa alokasi anggaran untuk dukungan manajemen internal sangat besar, sementara alokasi kegiatan untuk penunjang kinerja BKIPM minum.

Dan yang terakhir, kami berharap untuk program-program seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu tadi program untuk kegiatan dari Kementerian KKP di tahun 2021 banyak program-program yang dibawa ke daerah untuk aspirasi masyarakat karena sangat berharap kami merasakan untuk KKP tahun 2020 sangat minim. Sehingga tahun 2021 bisa terserap lebih maksimal terutama kepada masyarakat, program bisa bermanfaat untuk masyarakat.

Terima kasih Bapak, ini yang bisa saya sampaikan semoga ke depan tidak ada kendala apapun. Bisa berjalan dengan lancar sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Saya akhiri.

*Wallahu Muwafiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alalikum Salam.

Terima kasih.

Selanjutnya kita pada orang yang punya pengalaman di DPR RI, jarang berbicara tapi pandai bergaul, bisa membawa siapa saja. Dan mungkin sebentar lagi jadi gubernur di Daerah Pemilihan, apakah dibagi dua atau dibagi tiga provinsinya itu bagaimana. Om Rudi silakan.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Terima kasih Bapak Dedi.

Mudah-mudahan ke depan Bapak Dedi juga menjadi gubernur, aamiin.

Bapak Sekjen, Bapak Dirjen yang saya hormati.

Saya hanya ingin mempertegas saja mohon bantuan untuk kiranya beberapa usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dirjen di KKP kiranya bisa diperhatikan karena kami itu ada dua Dapil Bapak Sekjen dan Bapak Dirjen, yaitu NTB I itu Pulau Sumbawa saya dan saudara saya Johan ini dan NTB II itu di Pulau Lombok. Jadi kami konsen untuk membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat di NTB I Pulau Sumbawa. Kalau tidak salah beberapa Dirjen terutama Dirjen PDS ada pengajuan dari Pemerintah Daerah mohon kiranya untuk anggaran ke depan bisa dibantu dengan hormat.

Kemudian yang kedua, ada di halaman 18 itu di wolrd Bank itu saya tadi konsultasi sama saudara saya Johan, kalau tidak salah daerah kepulauan itu ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kami kalau khususnya pribadi saya kalau mendengar atau membaca ini ada Gorontalo dan lain-lain mungkin kami juga bisa pinggir-pinggirnya dimasukkan untuk Nusa Tenggara Barat I di Pulau Sumbawa, jadi bisa disisipkan untuk bantuan luar negeri. Saya kira itu

saja mungkin Bapak Sekjen, jadi saya menyampaikan untuk kepentingan masyarakat saja.

Terima kasih Bapak Dedi, Bapak Gubernur.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih banyak dan mudah-mudahan terus mengasuh adik asuhnya sampai nanti jadi Bupati di Madura. Selanjutnya ini tokoh kita selalu membawas rezeki dan kebaikan bagi Komisi IV DPR RI, Ibu Riezky Aprilia.

Silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama saya mohon maaf atas keterlambatan yang penting hadir.

Bapak Dirjen, Bapak Sekjen, saya hanya ingin memastikan pertama program yang kemarin saya harapkan itu tidak muncul, saya harapkan benar-benar tidak muncul jangan seperti mantra ya lain disisipkan di tempat yang lain, yaitu Piamari ya Bapak Sekjen. Saya kan bertitik tolak dari kami rapat estafet kemarin memang tidak muncul tapi pas dibaca ulang nanti tiba-tiba muncul dengan berkamufase dengan hal-hal yang berbeda. Ini sudah biasa kalau di Komisi IV DPR RI lihat yang begitu itu, sudah jadi adat yang tidak baik.

Kemudian saya hanya ingin menanyakan kayak loan dari NGO-kah atau luar. Tolong dong Pak, karena inikan juga ada saya lihat dipaparan kami hanya butuh penjelasan kenapa titiknya disana loannya itu. Terus bagaimana teknisnya karena kan setahu saya mungkin itu juga PNBK yang harus kami awasi juga, kan kami punya fungsi pengawasan supaya tepat. Kalau sampai ada apa-apa nantikan Bapak-bapak juga. Kayaknya muka Pimpinan saya dari kemarin agak marah sama saya jadi ya cuman dua itu saja Pak. Jangan sampai Piamari ini nanti tersisipkan dengan bentuk yang lain, jadi iya marah maksudnya iya marah tahulah siapa yang marah. Terus juga masalah loan ada tulisannya DED atau apalah itu Bapak Sekjen. Saya lihat kan Bapak Sekjen bager ya jangan sampai dikibulin. Jadi itu saja maksud saya dan apabila kurang berkenan dengan kata-kata saya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, kepada Pimpinan jangan marah lagi.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Kiki.

Pimpinan itu tidak marah sama Ibu Kiki, tapi itu justru sayang karena hidup itu akan menjadi gelombang yang indah manakal ada cemberutnya, ada senyumnya, kalau senyum terus kan orang gila namanya. Tenang saja santai. Dan tinggal yang terakhir, inikan pertanyaan itu representasi Fraksi sesuai dengan Tatib. Selanjutnya ya sudah berbudi, sudah setia, ya sekarang datang juga rapat, terima kasih.

F-PG (BUDHY SETIAWAN):

Terima kasih.

Ada hal yang memang terlupakan mungkin di dalam evaluasi pelaksanaan anggaran KKP tahun 2020 ini. Terutama tentang berapa posisi nilai tukar nelayan kita Pak, kemudian berapa PDB akhir yang dihasilkan dari sector kelautan dan perikanan ini. Jadi sebaiknya dua data itu penting untuk menggambarkan bahwa program kerja yang Bapak-bapak buat di Kementerian Kelautan dan Perikanan semua program maupun apapun itu berdampak kepada peningkatan PDB peningkatannya berapa. Kemudian berdampak juga kepada pelakunya, nilai tukar nelayan jadi berapa.

Saat ini kondisi nelayan kita boleh dibilang kalau lihat data dari BPS pada Juli 2020 itu mungkin di sekitar 103 sampai 104 Pak, nilai tukarnya beda-beda tipis Pak itu, nyaris dengan plas-plos saja itu Pak. Artinya, memang nelayan kita masih berkuat di sector bagaimana menghasilkan produksi dan dia jauh dari sector hilirnya. Nilai tukar itukan berpengaruh disitu Pak, kalau dia bisa mendekatkan aksesnya kepada hilir, kepada processing, kepada pengolahan, kepada sortasi, kepada grading itu akan menaikkan nilai tukar dia Pak.

Nah, ada baiknya focus kegiatan tahun 2021 apabila memang mengarah kepada nilai tukar nelayan 115 maka arahkan kesana penguatan kepada produksinya dan juga memperdekat akses terhadap hilirisasi. Saya langsung saja bahwa saya lihat disini setiap Dirjen dan badan di Kelautan dan Perikanan ini ada kegiatan dukungan manajemen di dalam kegiatan non prioritas nasionalnya. Ini saran saya kalau ini yang memang berbau kepada anggaran perjalanan termasuk juga kegiatan rutin, apabila itu berbau anggaran perjalanan mengingat kita masih 2021 ini masih dampak covid ini masih Pak. Jadi baiknya anggaran perjalanan yang ada bisa dialihkan untuk peningkatan penguatan kegiatan budi daya, produksi, dan juga akses hilirisasi, yaitu berupa mekanisasi atau teknologi kepada para nelayan ini. Ini bisa dikurangi Pak, masih banyak hal yang kita masih bisa bedah dari anggaran yang ada ini terutama di kegiatan rutin dan dukungan manajemen yang ada di setiap Dirjen dan badan ini. Kurangi saja 10% Pak, akan lebih banyak anggaran yang tertuju kepada penguatan nelayan untuk kemudian nanti bisa memperbaiki nilai tukar nelayan tersebut.

Demikian, terima kasih.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Terima kasih.

Yang saya hormati Pimpinan.

Yang pertama, saya ingin tanggapi adalah FS dan DED ini kebanyakan Pak, saya tidak setuju dengan ini. Perikanan Tangkap FS-nya itu Rp12 miliar, Budidaya Rp15 miliar, Daya Saing Rp4,8 miliar, Ruang Laut Zonasi Rp16 miliar, Badan Riset Rp3 miliar. Saya kira di Riset oke karena ini Balitbang, saya kira ini bisa mengcover seluruh yang ada di Kelautan. Terus Rp47,8 miliar ini hanya untuk riset dan DED saja, buat apa? Tidak ada kepentingannya dengan nelayan. Seandainya disetujui saya keluar dari ruangan ini.

Yang selanjutnya kemarin kita mengatakan bahwa ada kemahalan terhadap pengadaan kapal 5 GT. Oke, sudah diturunkan tapi justru dikurangi. Harusnya inikan perikanan tangkap intinya adalah kapal, rumpon, kemudian alat tangkap. Justru ini yang tadinya anggaran Rp745 miliar jadi Rp30 miliar, kalau kemahalan berarti bertambah volumenya Pak, bukan dikurangi anggarannya. Jadi saya melihat di Perikanan Tangkap ini semua kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya dengan nelayan. Rumpon yang saya ajukan tidak menjadi perhatian Bapak.

Uji coba kapal datar 2 unit Rp3 miliar, ini untuk kepentingan siapa? Kapal apa yang mau diuji coba ini sampai Rp3 miliar anggarannya, sedangkan membuat kapal 20 GT katanya tidak bisa. Jadi saya mohon Pak, untuk Perikanan Tangkap fokus kepada kepentingan nelayan bukan kepada kepentingan siapa-siapa. Apalagi dukungan manajemennya Rp81 miliar.

Yang selanjutnya di Budidaya. Budidaya juga ini saya melihat tidak mencerminkan, tidak fokus kepada kepentingan nelayan. Katakanlah sekarang ini kita di lobster, bagaimana lobster bisa dibudidaya. Tidak ada keramba lobster di dalam, jadi apa yang mau dibudidaya. Jadi saya minta Pak, supaya fokus kalau tidak fokus susah. Sampai 2020 ini tidak ada satupun bantuan sampai Sulawesi Barat kecuali Bansos di Dapil Sulawesi Barat, satu provinsi ini Pak, satu sen pun tidak ada bantuan turun kecuali Bansos, Bansos oke. Jadi kalau tidak fokus susah. Jadi saya minta Pak, supaya lebih fokus. Demikian juga yang lain mungkin pada rapat-rapat berikutnya atau mungkin ada forum tertentu kita bisa diskusi lebih mendalam. Kemarin banyak hal-hal yang di sampaikan tetapi seluruhnya tidak tercover disini.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sudah selesai? Ya kita pahami karena interupsinya konstruktif.

Selanjutnya Bapak Ketua di persilakan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Tadi kita sudah lihat teman-teman Anggota banyak mengkritisi, Kepala Biro Perencanaan datang tidak? Saya mau tanya awalnya kapal 5 GT ini Rp600 juta dari mana, hitungannya di mana? Jawab, ijin Bapak Sekjen saya suruh menjawab, karena setelah saya telepon Dirjen Tangkap saya marah sama dia, mana mungkin kapal 5 GT Rp600 juta baru dirubah. Tolong negara dalam keadaan prihatin, kalau saya tidak telepon Zaini mungkin ini lolos Rp600 juta. Dan disini juga tidak jelas, pengadaan *portable cold storage* dengan ABF, berapa besarnya? Terus mampukah alat ini diberikan kepada koperasi atau kelompok mengelolanya. Apakah alat ini diam atau portable, kalau portable berarti dia kan pakai mobil ditarik semacam container, di sini tidak jelas.

Kemudian ada lagi *ice flake machine*, *ice flake machine* itu kemarin kan sudah saya ngomong dengan minus 4, minus 5 sudah jadi, 2 sampai 4 jadi. Dan ini pasti tidak ada gunanya, kecuali KKP mau mensupport supermarket, kalau supermarket kan hanya untuk pendingin saja, kalau untuk nelayan ya tidak mungkin lah. Saya minta ini lebih baik di hilangkan atau ditukar dengan pabrik es batu mini. Tapi kita pikirkan juga tadi ini *cold storage* ini, misalkan dikasih ke Maluku ada tidak listriknya, cukup tidak dayanya. Kalau saya bicara saya juga kepengen minta ini untuk wilayah saya pesisir barat misalnya, di sana ikannya rata-rata black marlin ikan besar-besar. Tapi apa? di Kabupaten tersebut satu hari mati lampunya lebih dari 20 kali. Jadi saya juga tahu diri kalau minta turun naik-turun naik dia punya dayanya otomatis jebol.

Bapak Sekjen, saya di Lampung itu ada dua, saya tidak mau minta lagi karena apa? Tidak ada yang ngurus, tidak ada yang tanggungjawab. Ini loh, tolong kalau pengadaan itu yang benarlah. Coba siapa yang bisa menjawab ini masalah *portable cold storage* yang pakai ABF, ya jawab berapa besarnya.

KUASA DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Ijin Bapak Sekjen.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kami dari PDS mewakili Ibu Dirjen, terkait dengan perencanaan untuk *cold storage portable* yang di rencanakan adalah dengan ukuran 20 feed dengan genset, panel dan peralatan.

KETUA RAPAT:

20 feed kira-kira berapa ton?

KUASA DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

20 feed bisa masuk optimal 13 ton masuk Pak.

KETUA RAPAT:

Dengan 20 feed bisa masuk 13 ton, anda yakin, itu meter kubik ya, yakin, 20 feed itu berapa kali berapa, coba hitung.

KUASA DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Dimensi 2 meter tingginya Pak, panjangnya sekitar 5 meter, lebarnya 2 meter Pak.

KETUA RAPAT:

Itu bicara masalah yang anda katakan tadi seperti ini kan misalnya kan, disini tidak ada panel di dalamnya, kan ada untuk pendinginnya. Termasuk ABF, ABF itu kan ikan dari nelayan dimasukkan langsung di blush 40 derajat celcius, setelah itu baru di pindahkan ke *cold storage*. Betul?

KUASA DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Betul Bapak.

KETUA RAPAT:

Karena saya ini begitu lihat gitu kemarin langsung saya cari tahu, kira-kira harga itu kemahalan tidak. Kedua, mampu tidak mengoperasikannya gimana. Inikan namanya *portable*, *portable* kan berarti ditarik kan, dikasih gandingan kan?

KUASA DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Betul Bapak.

KETUA RAPAT:

Betul kan?

KUASA DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Betul Bapak, *portable* Pak.

KETUA RAPAT:

Karena saya juga tahu sudah ada yang menawarkan ke Kementerian Kelautan dengan teknologi Australia, harganya sekian dengan solar panel. Betul tidak saya tanya, sudah ada yang nawar kan.

KUASA DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terdapat beberapa cukup banyak penawaran ke KKP Pak.

KETUA RAPAT:

Iya, jadi kalau 20 feed itu kalau kita lihat dengan ABF dan lain-lain sekarang kan berarti yang 20 feed-nya juga harus ada dua dong, satu untuk ABF, satu untuk cold storage gitu, bukan? Antara ABF sama cold storage pasti beda dong.

KUASA DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Mohon ijin Bapak Pimpinan, jadi berdasarkan Rapat Dengar Pendapat minggu lalu kami mengexercise kembali karena ada penambahan jumlah distribusi atas bantuan *cold storage* ini kami mengalokasikan perencanaan dua asumsi Bapak. Asumsi pertama jika ikan masuk dalam kondisi frozen artinya dia tidak pakai ABF, kalau ikan masuk dalam kondisi fresh dia harus disemprot dulu dengan ABF. Nah, untuk yang sementara ini yang *portable* ini posisinya yang saat ini ada yang tanpa ABF Bapak, 20 feed.

KETUA RAPAT:

Kalau yang tanpa ABF berapa, yang 20 feed tanpa ABF.

KUASA DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Tanpa ABF Bapak, di wilayah barat itu 1,6 miliar terdiri dari Gedung beku *portable* 2 feed dengan anternya, genset 20 KPA bersama panel dan peralatan. Lalu kalau di wilayah tengah dengan item yang sama 1,9 miliar.

KETUA RAPAT:

Maksudnya wilayah tengah?

KUASA DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Indonesia bagian tengah Bapak, jadi beda harganya.

KETUA RAPAT:

Beda harga 300 juta untuk ongkos angkut?

KUASA DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Sementara yang kami dapatkan dari perencana seperti itu Bapak, dari Direktoratunya.

KETUA RAPAT:

Dari siapa?

KUASA DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Dari Direktoratunya dari kami Pak.

KETUA RAPAT:

Ongkos angkut 20 feed dari Jakarta misalnya kemana lah ke Maluku, kalau 300 juta mah sudah kelewatan. Saya minta tolong dihitung ulang lagi, saudara Irjen saya minta dihitung ulang. Dan saya yakin ini pasti nanti kalau ini berjalan pasti ada temuan dari saya. Sekjen ini baru, beliau ini sangat pintar cuman belum terlalu paham masalah yang tadi itu. Beliau ini Polisi loh, nanti saya minta supaya Anggotanya beliau ya mengusut kalau cara begini. Saya bukan mencari kesalahan tetapi ayolah kita berbuat yang sedikit baik, tidak usah bilang 100% baik sedikit baik saja sudah cukup. Kalau tadi anda bilang *cold storage* 20 feed dengan 1,7 tanpa ABF saya rasa 1 miliar juga dapat, taruhan sama saya.

Demikian pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI.

F-PKB (FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.):

Interupsi Pimpinan, saya dari Fraksi PKB tadi belum.

KETUA RAPAT:

Tunggu dulu sebentar.

Selanjutnya nanti kita persilakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang hari ini diwakili oleh Sekjen untuk menjawab pertanyaan Anggota. Sebelumnya saya persilakan dari Fraksi PKB.

F-PKB (FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.):

Terima kasih Pimpinan.

Selamat siang Bapak Sekjen beserta jajarannya.

Menanggapi beberapa laporan ini ternyata banyak yang belum terserap ya, anggarannya hampir di bawah hampir 50%, ini target tinggal 3 bulan lagi. Kira-kira apa ini yang akan diserap dalam waktu yang sangat pendek ini. Terus yang kedua, dalam 2 tahun terakhir ini Ditjen Perikanan Budidaya anggarannya naik sangat-sangat signifikan hampir 85%, yaitu Rp656 miliar. Tapi sampai saat ini Pak, di Budidaya saya program pertama itu kalau tidak salah bibit seperti yang Mbak Ema sampaikan tidak sampai kepada kami selaku. Jadi saya malu sekali ke konsituen kami, bahwa waktu itu saya suruh data akhirnya saya punya solusi sendiri bagaimana masyarakat yang sangat mengharapkan bantuan dari Ditjen Budidaya untuk bibit ikannya ternyata tidak turun, akhirnya saya inisiatif membeli dengan uang saya sendiri. Karena bagaimana pun beberapa masyarakat apalagi dengan dampak COVID seperti ini sangat berharap sekali, bahkan ini anggarannya sangat besar sekali. Tapi kenapa sampai tidak bisa turun padahal itu kita dikasih yang pertama kali gitu loh, kendalanya dimana. Target segini besarnya, kenaikan anggaran yang begitu besarnya kira-kira apa target yang akan dicapai sedangkan program-program yang di daerah kami yang di masyarakat belum merasakan sama sekali.

Terus terkait dengan usulan pinjaman luar negeri tahun 2021 sampai 2024 sebanyak 273 US Dolar, hibah 17 juta Dolar. Ini sifat pinjaman dan hibahnya itu seperti apa terus nanti mekanisme pengembaliannya itu nanti seperti apa, mungkin nanti bisa dijelaskan. Mungkin itu saja cukup.

Pimpinan terima kasih, saya akhiri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Alhamdulillah kalau punya wakil rakyat seperti Ibu, jadi kalau dari Bapak Slamet tidak dapat ya bayar sendiri tidak apa-apa.

Silakan Bapak Menteri yang merangkap Bapak Sekjen untuk menjawab pertanyaan Anggota.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih banyak kepada Pimpinan Rapat, kepada semua yang ada disini Pak, dari Anggota Komisi IV DPR RI. Banyak masukan yang kami terima, banyak saran dan banyak kritik. Dan ada juga luar biasa, yang kami akan jawab semua satu-satu. Saya akan coba jawab tapi yang saya sampaikan tadi terima kasih atas peringatannya karena belum dilaksanakan. Itu ada harga 600 ujuk-ujuk bisa dipotong, ujuk-ujuk bahasanya, tidak tahunya angka itu 268 juta, saya baru tahu nanti saya mau lihat apa kok bisa dari Bapak Duka tadi ya, nanti ini yang tentang harga kapal 600 bisa dipotong 300 tidak tahunya pasarannya 268 juta sebetulnya. Nanti kami mau cek ini kenapa kok bisa dipasang 600, mau coba-coba sama saya, saya coba-coba juga nanti. Nanti kami cek Pak, termasuk dari Bapak ini, mohon maaf kalau tidak berurutan kami jawab.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Bapak Sekjen, saya ini tadi kan anggarannya ada 75 miliar pada tahap pertama kok dikurangi, itu yang saya tidak setuju kalau dikurangi. Selain markup-nya sudah benar tadi Bapak Sekjen 276 juta oke kita setuju Pak, tapi jangan dikurangi anggarannya karena ini kepentingan publik.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Mungkin nanti jumlahnya diperbanyak kuantitasnya, jadi *alhamdulillah* jadi bisa banyak dapatnya gitu kan. Ini dari belakang dulu dari Bapak Suhardi Duka karena ini temuan-temuan kalau yang lain mungkin bisa dijawab karena tidak bisa, kalau ini temuan ini bisa berakibat hukum nanti ini. Kayak ujicoba kapal plat datar mahal ini FS DED, FS *major project* ini, terima kasih masuknya ini Pak, kita mau lihat dengan Bapak Irjen ini kok bisa masuk ada 6 miliar, keterlaluhan juga ini mahal banget. Bisa kami kurangi atau kami buang sekalian lah, kalau bisa gratis biasanya kalau pabrik itu kalau mau dicoba kayaknya tidak bayar, bayar lagi dia malah supaya bisa laku, kalau ini kita yang bayar. Terima kasih banyak Bapak Suhardi Duka, terutama yang saya utamakan ini saya pertamakan atau saya dahulukan menjawabnya.

Yang pertama-tama kepada Ibu Endang terima kasih ada masukan sama dari Ibu Endang, dari Bapak Muslim, Bapak Slamet, Ibu Erna, tentang penyerapan. Ada beberapa yang penyerapan kenapa baru 54,44% apakah mampu KKP untuk menyerap di akhir tahun ini. Kami sudah beberapa kali kami kumpulkan para Dirjen, para Karo, para Badan untuk pertanggungjawaban tentang penyerapan ini. Di sisa 4 bulan ini karena banyak kegiatan yang masih berjalan mereka menyanggupi tapi di angka 92% kemungkinan tidak bisa 100% untuk penyerapan anggaran. Saya sampaikan di depan Dewan sebagai pertanggungjawaban selain kepada saya nanti di KKP juga kepada Dewan yang terhormat di Komisi IV DPR RI tentang janji, tentang target mereka sampai di 92% penyerapan anggarannya.

Untuk masukan penggunaan karet kapal, ini baru tahu Ibu penggunaan karet untuk kapal, kenapa tidak Ibu ya, kan ada pengadaan kita nanti tolong dari Dirjen Tangkap diakomodir. Lalu dipanggil juga para peneliti-peneliti tadi masukan.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

Yang bersangkutan bersedia untuk presentasi.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Silakan Ibu di jadwalkan langsung, kita bisa terapkan mungkin karena kemarin yang kami dapat masukan adalah protes kok semua dipakai fiber kan tidak semua cocok dengan fiber, bagaimana kalau dicombain ada ya fiber kalau cocok fiber, kalau kayu silakan kayu, alangkah baiknya lagi kalau ada karet bisa diakomodir dengan teknologi yang terbaru. Kalau menurut saya luar biasa kalau bisa, karena karet ini berlebih di Indonesia ini harga lagi turun, selain untuk campuran aspal juga mungkin untuk bahan kapal Bapak Dirjen Tangkap. Silakan Bapak Dirjen Tangkap nanti sama Ibu Endang.

Untuk Dana Alokasi Khusus seperti masukan Ibu terima kasih, kami akan antisipasi untuk terutama untuk mensejahterakan juga apa yang disampaikan oleh daerah akan kami pelajari kembali Ibu, memang tidak bisa kerja biasa, kita harus kerja luar biasa. Yang lain libur Pak, pulang nanti libur, kalau saya tidak panggil saya panggil sudah resiko. Yang penting satu, 3 cara kita selalu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan itu saja tidak ada lagi obatnya. Mudah-mudahan bisa tidak bertambah lagi, aamiin.

Untuk peneliti-peneliti Ibu dari UGM, IPB, mereka *Alhamdulillah* atensi ya kita tidak bisa dijamin jangan sampai merea mutung kan. Capek peneliti ini, mahal, luar biasa, tidak akan maju suatu negara kalau penelitiannya diad-diam saja. Terima kasih Ibu.

Untuk Bapak Muslim, penyerapan anggaran sudah kami tadi sampaikan. Untuk PNPB di bidang pajak ekspor, mohon maaf bukan domain kami tapi ada di Ditjen Pajak. Untuk PNPB kami sudah kami sampaikan hanya itu tapi kalau untuk pajaknya berapa kami belum bisa karena bukan domain kami. Terima kasih atas masukannya tadi di Budidaya akan kami tekan kembali.

Untuk Dirjen PDS untuk mobil alih teknologi ada 10 Pak, sudah dianggarkan memang tidak tertulis disini ada di point tadi ada. Untuk janji saya Pak, bukan janji mereka ada 10 mobil karena malu juga penyerahan kunci mana mobilnya tidak ada. Terima kasih Pak, nanti tolong ditagih kembali Pak.

Untuk Bapak Slamet untuk penyerapan sama tadi pertanyaannya dengan dari Ibu Endang dengan yang lain. Untuk *portable cold storage* masukan dari Rapat Dengar Pendapat kemarin itu kami sesuaikan dengan masukan kemarin Pak, yang sebelumnya Rapat Kerja bahwanya untuk

integrated cold storage alangkah baiknya kalau portable kami menyesuaikan masukan itu kami pertimbangkan dan sangat baik, jadi kami rubah antara yang tetap menjadi portable supaya masyarakat bisa merasakan.

Untuk ada beberapa anggaran yang diajukan di para Dirjen, yaitu tentang data. Jadi Bapak Menteri kami ingin big data, nanti mungkin silakan Bapak Dirjen yang menerangkan lebih teknisnya karena saya hanya tahu sepintas saja.

Silakan.

DIRJEN PERIKANAN BUDIDAYA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Dr. Ir. SLAMET SOEBJAKTO, M.Si.):

Ya, baik ijin Bapak Sekjen.

Bapak Ketua, wakil Ketua dan Anggota.

Terkait dengan big data ini sebetulnya memang kita sekarang di berikan kepada tiap-tiap Direktorat, agar memberikan data-data yang lebih valid. Termasuk juga dengan penganggaran imunerator di setiap kabupaten/kota karena wilayah di kabupaten ini sekitar ada 5000-an lebih. Di samping itu juga ada data-data yang khusus terkait dengan data komoditas seperti yang sekarang sedang di kembangkan adalah data udang nasional, begitu juga untuk lahan budidaya dan lain-lain. Jadi ini kita nanti akan mensupply data-data tersebut kepada *one* data yang dikelola dari Sekretariat Jenderal. Saya kira demikian Pak.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Bapak Dirjen.

Kami akan menjawab dari Ibu Erna.

F-PKS (Drh. H. SLAMET):

Interupsi sedikit.

Terima kasih Pimpinan.

Saya secara pribadi tidak permasalahan itu hanya saya butuh ukuran keberhasilan nanti pengumpulan data sehingga di akhir pelaksanaan program nanti kita bisa dalam rangka pengawasan, fungsi pengawasan kita bis ukur dana yang miliaran untuk menyusun big data itu sukses atau tidak. Itu saja mungkin Pimpinan.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Pak Slamet.

Untuk Ibu Erna tadi masukannya tentang sasaran milenial akan kami prioritaskan. Untuk penyerapan tadi sudah terjawab Ibu, kami punya target sudah kami panggil dan mereka sudah ada resikonya 92%. Untuk benih ada beberapa orang yang nagih ini, ini sudah banyak bicara ke Dapilnya, ke rakyatnya, benih akan kami bantu ternyata tidak datang-datang Bapak ini yang salah. Tolong Bapak dicatat tagih saja Ibu, apalagi sudah ada yang nalangin ini luar biasa, terima kasih atas talangannya kami bayar, harus.

Untuk BKIPM Ibu Erna, alokasi internal. Jadi manajemen besar mohon maaf, kalau dilihat BKIPM memang alokasi manajemennya besar, karena setiap itu ada Ibu BKIPM di provinsi-provinsi pegawainya banyak, keperluan di manajemen bayar gaji, bayar uang makan, operasional terutama, jadi memang lebih besar daripada kegiatan lainnya. Jadi perkantoran ya itu gaji itu. Dan kalau kita lihat saya sudah beberapa datang di BKIPM bersih-bersih mereka, mungkin habisnya mungkin banyak. Terima kasih Ibu ya.

Untuk Bapak Rudi di NTB anggaran daerah agar dibantu untuk NTB, kami akan prioritaskan NTB bukan hanya Lombok juga Sumbawanya. Terima kasih Bapak Rudi. Untuk Ibu Riezky, kami konsisten tidak ada pengeluaran di Piamari lagi, tidak ada Ibu, tidak ada gunanya itu. Untuk Bapak Budhy Setiawan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

Bapak Sekjen, saya apresiasi Bapak bilang itu sudah bakalan tidak ada lagi dan Bapak sebagai jaminannya gitu. Sekedar mengingatkan Pak, di Sumatera Selatan itu saya kebetulan dari Sumatera Selatan satu Dapil sama Bapak Menteri itu sebenarnya. Banyak program-program KKP yang mangkrak dan bahkan sudah menjadi temuan BPK saya rasa Bapak Irjen itu orang Sumsel juga saya tahu itu. Program-program yang mangkrak ini mau gimana tindaklanjutnya Pak. Contoh pasar ikan modern saya tolak Pak, itu karena amdal-amdal lalannya tidak jelas sampai sekarang. Begitu saya keluar juga BPK masuk loh Pak. Tolong Pak, saya ingin menyelamatkan teman-teman karena kami juga Pimpinan DPR RI juga sebenarnya mensupport bicara kemaritiman ini Pak. Tapi mohon Pak, ke depan Bapak Sekjen Bapak ini bager lah kelihatan, tapi supaya ke depannya enak Pak, seperti saya bilang tolong banyakin program yang saya rasa teman-teman ini lebih banyak faedahnya dari pada mudorotnya. Itu saja saya ingatkan Pak.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Ibu.

Luar biasa Alhamdulillah masukan, peringatkan, kami bukan tampung kami akan laksanakan jangan sampai melaksanakan atau menganggarkan atau merencanakan suatu kegiatan apapun proyeknya yang banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Ini uang rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Setuju Pak, setuju Ibu ya.

Kalau untuk yang tadi proyek mangkrak saya belum tahu tapi memang betul di BPK ada beberapa temuan kita harus luruskan, kita harus selesaikan, harus kita tinalanjuti. Selanjutnya mohon maaf Bapak Ketua, untuk lebih jelasnya yang di Lampung ini, Sumatera Selatan silakan Bapak Irjen menjawab.

IRJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Mohon ijin Bapak Ketua.

Bapak Ketua yang kami hormati,
Bapak dan Ibu sekalian.

Ibu Kiki yang saya hormati, yang Palembang itu bukan masalah besar Ibu, hanya masalah anggaran *cold storage* belum tersedia lagi diimpor dari Cina. Jadi kalau diresmikan kan mubazir dia tidak bisa beroperasi, maka kita pending peresmiannya kebetulan Bapak Menteri juga masih mengatur waktu. Temuan-temuan BPK, temuan-temuan kecil kemarin sudah kita perbaiki semua. Nah, seluruh dokumen sudah lengkap, Amdal ada, semua ada, jadi tidak ada masalah hanya waktu saja peresmian Pak Ketua. Dan kami memastikan itu karena kami ikut melakukan monitoring disitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya Mbak Kiki, mau ngomong.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pak, ijin ya Pak, ini namanya kita diskusi. Kebetulan posisi pasar ikan modern itu di dekat tempat tinggal saya kecil Pak. Jadi saya tahu persis, Bapak saya cuman mengingatkan kalau memang pertama saya sudah kesana waktu itu didampingi sama Pak Mahmud atau siapa Direktur apa waktu itu. Limbahnya saya pastikan bermasalah karena di belakang itu persis pemukiman penduduk. Saya hanya mengingatkan loh Pak, kalau mau jalan silakan, itu yang pertama.

Yang kedua, speck saya diajak naik lift saya tidak berani Pak, kenapa? Itu jeep. Semua, cobain saja kalau Bapak Sekjen berani naik liftnya, saya yakin begitu naik turun sendiri Bapak belum pencet apa-apa. Saya sih ngomong apa adanya, kan begitu. Nah, kemudian saya ini muterin saya ada dua jam disitu lebih lah, sampai membatalkan agenda yang lain. Kalau

memang perlu ya kita datang kesana, jangan dipaksakan Pak, maksud saya proyek ini jangan dipaksakan. Kalau memang ternyata mau diresmikan dengan alasannya ini-ini ya sudah tidak apa-apa silakan. Cuma Pak, seperti yang saya bilang masyarakat itu yang di demo itu bukan kementerianya, DPR RI-nya tidak ada otak katanya tidak memperjuangkan suara rakyatnya, kan begitu Pak, masyarakat tidak ngerti. Jadi kenapa saya bilang dari awal masa sidang ini saya bilang saya menolak proyek fisik. Banyak sekali proyek di Sumatera Selatan itu broodstock juga di Musi Rawas tidak jelas, saya datengin wilayahnya “wah Ibu, kita cuman disuruh melepas ikan”, “lah dimana tempatnya?”, “tidak ada”. Tapi kalau kita mau buka-bukaan disini ya sudahlah tinggal silakan Bapak-bapak saya yakin Bapak punya jaringan lebih luas daripada kami disini yang bisa membuka dan mempertahankan, dan memperjuangkan yang mana yang baik dan mana yang tidak. itu saja Pak.

Terima kasih.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Interupsi Ketua.

Baik, tadi dijelaskan oleh Bapak Slamet Dirjen Budidaya tentang *big data*. Saya prinsip apapun alasannya kalau Rp47 miliar ini hanya untuk FSDED saya tidak setuju Pak, dan kalau mau disetujui disini saya mau keluar dari ruangan ini, Fraksi saya semua keluar. Ini tidak masuk akal Pak, *big data* Rp47 miliar, bikin kapal Rp30 miliar, dimana kita punya berpikir dan cara pandang kita. Okelah kalau Rp5 miliar di Balitbang oke, silakan *study* karena itukan kerjanya Balitbang. Tapi kalau ini mau disetujui saya minta mohon maaf Pimpinan saya tidak ikut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Dilanjut Bapak Sekjen, ada lagi yang mau disampaikan jawabannya.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Bapak Duka.

Akan kami dalami Pak, nanti kami laporkan kalau memang mahal ya sudah berapa yang sebenarnya kami akan dalami nanti barusan saya bisik-bisik sama Bapak Irjen kita laporkan segera.

Untuk yang terakhir dari Bapak Budi Setiawan untuk nilai NTN (Nilai Tukar Nelayan) yang berkisar sekarang 102, 103, 104, untuk akses masukan ke akses antara nelayan menuju hilir atau nelayan sampai ke hilir harus dipotong sehingga bisa menaikkan nilai tukar nelayan focus untuk target 100, mudah-mudahan 115 memang harus ada upaya-upaya yang keras dari semua pihak terutama kami, yaitu untuk penguatan dan pemanfaatan

peningkatan teknologi untuk masyarakat. Terima kasih untuk masukannya kami akan laksanakan.

Mungkin itu saja Bapak Ketua, yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan itu dari kami.

Terima kasih Bapak.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, interupsi boleh Ketua.

KETUA RAPAT:

Dari tadi kenapa tidak ngomong pakai interupsi segala.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Nunggu Pak Sekjen selesai, kan tidak enak.

KETUA RAPAT:

Silakan, waktunya sudah mau habis.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bapak Sekjen, para Eselon I dan Bapak Ketua yang saya hormati.

Tadi ada beberapa usulan teman-teman menurut saya begini Bapak Ketua, inikan mau dibawa ke Banggar paling lambat malam ini Bapak Ketua. Kalau kemudian masih ada pendalaman menurut saya lebih baik, tadikan ada beberapa usulan saya mendengar dari Bapak Suhardi Duka, dari Bapak Slamet dan teman-teman termasuk Bapak Budi. Kita coba mensimulasikan kembali Pak Sekjen, terkait dengan alokasi anggaran yang ada serta realokasi. Tadi saya juga setuju dengan Bapak Budi, kalau kemudian inikan masih corona Pak, masih WFH itu. Tadi usulan bahwa ada kita coba evaluasi kembali operasional manajemen dan operasional kantor begitu, rasanya menurut saya nanti Bapak Irjen nanti bisa memberikan gambaran. Mungkin pemakaian listrik dan perjalanan dinas juga bisa selesai Pak, masih bisa kita kurangi.

Saya usulan Bapak Ketua, kalau kemudian ini masih ada simulasi kita usulkan saja bahwa kasih kesempatan dulu sama para Eselon I untuk

merealokasi anggaran yang ada, kita kasih kesempatan sebelum ada kesimpulan Bapak Sekjen. Karena apa? Karena malam ini kita harus sudah selesai. Kita kasih kesempatan satu jam lah Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Bukan malam ini, nanti saya jam 16,00 WIB harus menghadiri Paripurna, bukan malam. Jam 16.00 WIB harus sudah selesai kita harus menghadiri Paripurna.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Sekarang jam 12.00 WIB Ketua, masih ada waktulah setengah jam, satu jam, jam 13.00 WIB kita ambil kesimpulan tapi kita kasih kesempatan sama para Eselon I untuk melakukan realokasi, jangan menunggu gitu Bapak Ketua. Saya usul begitu Bapak Ketua.

F-P. NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak, Pak Sekjen apa perlu kita break untuk itu. Bapak mau ngomong? Apa yang mau diomongin Pak, silakan.

F-P. NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Saya kira ini soal keadila, kok punya saya tidak dijelaskan, kan punya saya jelas.

KETUA RAPAT:

Kan punya Bapak masih nempel di Bapak.

F-P. NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Iya Pak, siap.

Jadi begini Pak, saya sudah jelaskan dan saya sudah harapkan dari 6 kegiatan, kan tidak dijawab itu yang satu. Yang kedua, mungkin Bapak Dirjen Tangkap ini baru. Kami sudah sampai di tingkat desa bahkan ada di provinsi-provinsi lain soal apa yang dikata oleh Bapak Suhardi Duka. Soal Rumpun masyarakat kita yang ada di sana tidak terlalu dengan *cold storage*. Bapak Ketua, *cold storage* ini saya ini pabrik ada, *cold storage* ada, kalau bicara ABF-nya seperti apa, *cold storage* seperti apa, sulutnya seperti apa. Punya saya juga tidak jalan itu.

Jadi yang pertama Bapak Ketua, bukan soal apa-apanya pertamanya daerahnya dulu, daerahnya cukup bagus tapi juga disana bahan baku juga ada persaingan. Kedua, listrik dan yang ketiga tidak akan mungkin cold storage itu untuk masyarakat, itu pasti juga ada para pengusaha. Jadi saya kira pertama, yang saya katakan itu tolong rumpon yang diperhatikan. 5 GT itu buat kami itu tidak ada apa-apanya, cuman 2 unit itu apa dengan sekian banyak. Tapi kalau dikasih sekian rumpon itu dinikmati oleh masyarakat. Jadi saya kira itu coba diinikan apa boleh apa tidak, karena Maluku yang mengharapkan sekarang itu adalah pelabuhan terpadu sesuai dengan yang saya harapkan kemarin. Kalau itu ada 6 paket kalau memang uangnya tidak ada itu maka yang untuk 5 GT coret saja tapi yang penting kita dapat 1 paket untuk study kelayakan.

KETUA RAPAT:

Tapi Pak, kalau dihapuskan semua nanti Anggota lain 50 lebih complain yang sudah berharap dapat 5 GT. Pak Zaini, kalau saya tidak usah Pak, teman-teman Anggota saja dibagi saya tidak usah. Mungkin nanti 2022 kalau ada anggarannya Insya Allah saya dikasih kalau tidak, tidak usah tidak apa-apa.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag. M.H.):

Interupsi Ketua.

Masalah kapal Bapak Zaini, kalau bisa memang bukan 5 GT karena daerah kita banyak pelabuhannya yang tidak cukup untuk itu. Nelaya-nelayan kita nelayan kecil.

KETUA RAPAT:

Ya sudah, tadikan sudah saya jelaskan jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Tadikan beliau bilang kalau bisa dihilangkan, saya bilang jangan nanti Anggota lain ngambek, kan gitu.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag. M.H.):

Turunlah Ketua, jadi turun jadi kecil-kecil jadi per Anggota bisa bagi 20, 50.

KETUA RAPAT:

Jadi tidak perlu diulangi lagi karena waktunya sudah mepet.

Terakhir Bapak Dedi mau ngomong.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Pak Ketua, Bapak Sekjen, barangkali kalau Ibu Riezky sudah sangat alergi dengan pasar ikan modern karena pembangunan yang di Sumatera

Selatan. Kalau saya tidak alergi Pak, saya masih pengen tetap ada pasar ikan. Pakai kalimat modern atau jadul juga tidak apa-apa, pasar ikan dan pusat promosi produk perikanan ini sangat penting. Itu usulan saya saja.

Terima kasih.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Ketua, usulan Dapil Ketua.

KETUA RAPAT:

Ayo kenapa?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Waktu kita Reses perseorangan kita ngundang teman-teman dari Ditjen, pembangunan pelabuhan selatan yang mangkrak. Dan Bapak Sekjen memberikan berapa Dirjen datang termasuk Bapak Zaini, mohon untuk diperhatikan waktu kita pembicaraan di Tasik Selatan waktu itu.

Yang kedua yang masalah Bapak Mahmud Dirjen Penguatan Daya Saing. Ada pengadaan sentra ikan segar di Garut, kami waktu itu datang dengan Bapak Mahmud waktu ada sosialisasi gemar ikan. Mohon diperhatikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kiki mau ngomong?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Saya bukan bicara dalam konteks alergi atau tidak, tapi samplingnya di Jawa Barat pun di beberapa titik sudah ada Pimpinan Kang Dedi Mulyadi masalah pasar ikan modern ini. Pasar ikan modern inikan sudah ada di beberapa titik, dan semuanya bermasalah. Kenapa saya bicara tadi yang contoh nyata yang saya lihat juga di Jawa Barat, mungkin Kang Dedi coba saja cek di wilayah lain gitu loh. Nah, maksud saya dari awal saya sudah meminta sama semua mitra kurangi dulu proyek-proyek yang sorry *proyek oriented* atau *money oriented*, *fee oriented*, kurangi dulu masyarakat lagi susah sekarang, kan begitu. Toh siapa juga yang mau ngerjain sih, tukangnyanya juga tidak ada hari gini, kan begitu maksudnya.

Jadi mohon maaf Kang ... , bukan bicara ini maksudnya saya hanya mengingatkan saja proyek-proyek yang mangkrak ini untuk jangan dulu tiba-tiba muncul lagi, gitu loh. Sudah tahu yang kemarin belum beres terus tiba-tiba dengan nama yang sama, hal yang sama muncul lagi, itu saja.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi gini, KKP ini dari awal 2009 sampai terakhir 2019 itu semua pembangunan fisik sedikit-sedikit. Contoh, di kabupaten saya di Kabupaten Tanggamus dari jaman Fadel, jaman Cicip, jaman Susi ya butuhnya untuk menjadi satu pelabuhan itu Rp40 miliar. Ditinjau oleh Dirjen, oleh Sekjen, oleh ini sampai capai, dapatnya Rp2 miliar. Pasang dulu *break water*, *break waternya* hancur tahun kedua tidak dapat, nanti tahun ketiga dapat lagi Rp3 miliar, bangun lagi *break water* lagi, hancur lagi. Jadi Bapak Sekjen, apa kita break dulu, kita kesini memulai jam 12.30 WIB karena waktunya mepet sebelum jam 14.00 WIB kita sudah harus selesai karena menghadiri Paripurna.

Rapat saya skors.

(RAPAT DISKORS PUKUL 12.00 WIB)

.... (Rekaman terputus)

F-PG (ALIEN MUS):

Manfaat bagi para nelayan, intinya seperti itu Ketua. Terus yang tadi sudah disampaikan juga Pak Abdullah Tuasikal kalau berbicara soal Maluku dan Maluku Utara kan kita hampir sama Ketua. Jadi lumbung ikan nasional yang kemarin sudah kita sepakati bersama terus juga dalam pemaparan Rapat Dengar Pendapat kemarin soal Indonesia Timur adalah menjadi acuan untuk masuk dalam DAK mohon juga itu menjadi masukan buat Bapak Sekjen dan semua Dirjen di KKP, karena memang kami berharap sekali karena di KKP ini benar-benar wilayah timur itu benar-benar sangat ingin manfaatnya yang besar tapi untuk keseluruhan seluruh Indonesia mudah-mudahan di tahun 2021 ini yang kita ketahui COVID belum berakhir, tolong diprioritas penganggarannya jangan berorientasi ke sesuatu pembanguna project misalkan seperti itu. Mari yang tadi sudah dijelaskan sama Bapak Sekjen, *alhamdulillah* karena Morotai juga sampai sekarang hanya tiang bangunannya saja, bangunannya belum ada. Maka dari itu untuk penganggarannya mending tidak usah saja dulu, dialihkan ke yang lain. Begitu saja Ketua.

Terus untuk dukungan manajemen ya kita tahu bersama perjalanan dinas juga belum bisa diaktifitaskan oleh semua Eselon, jadi tolonglah ada pemangkasan dalam penganggaran untuk manajemen.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Alien.

Ada lagi yang lain?

Kalau tidak ada khusus untuk Badan Riset Sumber Daya Manusia, saya mendapatkan info ini ada sesuatu yang untuk proyek Piamari ini. Disini saya bacakan operasional kantor dan pemeliharaan ini hampir Rp189 miliar, jangan sampai sesuatu yang di sembunyikan ya. Termasuk juga dukungan manajemen 49 Satker, ini besar sekali loh. Operasional kantor dan pemeliharaan Rp189 miliar, jangan sampai ini dialihkan untuk Piamari, karena saya mendapatkan info dari dalam ini cenderung akan dialihkan kesana dengan kata lain pemeliharaan kantor dan lain-lain, ini di luar gaji. Sama juga seperti halnya kemarin di Kementerian Pertanian ada juga proyek yang disembunyi-semunyikan, saya tidak mau ini terjadi.

Dan nanti setelah ini 2020 sudah diserahkan belum satuan 3? 2020, 2021 kan belum jalan bagaimana, sudah ya. Nanti tolong dibagikan ke Anggota supaya Anggota bisa mengnecek kegiatannya secara detail. Saya ingatkan lagi Badan Riset hati-hati, kalau ini sampai ketahuan, terbongkar berarti pelanggaran hukum cukup berat. Karena semua bahan rapat, kesimpulan rapat, telah kami serahkan ke Banggar, kami juga menyerahkan Badan Pemeriksa Keuangan, karena kami tidak sanggup memeriksa satu per satu tapi kalau BPK yakin sanggup. Jadi kalau ada yang mau berbohong ya silakan, gitu saja.

Kesimpulan rapat sudah belum?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, saya boleh tambahkan sedikit Ketua, sambil menunggu kesimpulan rapat.

KETUA RAPAT:

Mau ngomong apa lagi?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Mengingatkan saja Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, boleh.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Sekjen, Bapak Irjen dan para Eselon I yang saya hormati.

Pada saat Rapat Kerja kita lalu dengan Bapak Menteri, saya pernah mengingatkan terkait dengan realokasi anggaran infrastruktur perikanan yang selama ini dikelola oleh Kementerian lain di luar Perikanan dan Kelautan. Tetapi kita harus punya dasar alasan yang jelas bagaimana mengalihkan anggaran alokasi infrastruktur perikanan itu dari Kementerian lain ke

perikanan. Saya cuman minta tolong sama Bapak Irjen, selama 5 tahun anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur perikanan oleh kementerian lain apakah benar dipakai untuk pelabuhan perikanan. Artinya begini, apakah selama 5 tahun ini ada berapa jumlah pelabuhan samudra, ada berapa jumlah pelabuhan nusantara, ada berapa jumlah pelabuhan pendaratan ikan, ada berapa jumlah TPI yang mangkrak selama 5 tahun terakhir ini. Saya curiga bahwa alokasi yang semestinya ke infrastruktur perikanan di Kementerian lain itu tidak digunakan kesitu.

Saya minta tolong sama Bapak Irjen melakukan satu analisis ada berapa yang mangkrak, ada berapa yang rusak Pak. Dan itu menjadi dasar bagi kita di Komisi IV DPR RI ataupun Bapak Menteri untuk meminta kepada Presiden realokasikan saja dari anggaran Kementerian lain kepada KKP. Karena 5 tahun yang lalu Pak, di Kementerian Kelautan ini membangun juga atau melakukan rehabilitasi terhadap pelabuhan perikanan atau bahkan kemudian memodernisasi. Kita tidak hanya tergantung kepada loan Pak, tapi juga harus ada dari internal APBN. Saya minta tolong sama Bapak Irjen, datanya itu lengkap Pak, sepengetahuan saya PPN itu ada 31, PPS itu ada 11, belum PPI Pak, belum TPI dan sebagainya. Kalau itu kita realokasi dari Kementerian lain kita minta, nanti tidak hanya Kementerian KKP Pak, Perinus dan Perindo pun itu bisa kita berdayakan Pak, kalau kemudian infrastrukturnya kita realokasi dari situ, tapi kita punya dasar Pak Irjen. Harus ada dasar bahwa memang betul mangkrak Pak. Kami menerima laporan dari daerah TPI-TPI itu juga mangkrak karena tidak ada alokasinya di DAK. Kami setiap kunjungan pun selalu terima keluhan yang sama tentang TPI Pak.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ya itu saja saya mau minta tolong.

Terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Saudara Sekjen, saya lihat di sinikan ada Perindo, ada Perinus, kira-kira ada masukan apa untuk kebaikan Perinus maupun Perindo mumpung kita masih nunggu, silakan kalau ada yang mau di sampaikan. Silakan Perinus apa Perindo dulu silakan, tidak apa-apa kita ngomong terbuka karena saya maunya apa, anda adalah anak perusahaan dari Perikanan, tapi ada juga anda Kementerian BUMN. Maksudnya ayo kita sharing kalau perlu nanti Sekjen membuat surat kepada Kementerian BUMN untuk membantu PMN atau apa agar berjalannya lebih baik lagi. Dan saya juga tidak mau seperti kejadian yang lalu BUMN cuman sebagai calon untuk kuota. Ayolah kita sama-sama membangun BUMN mitranya Komisi IV DPR RI.

Silakan.

DIREKTUR UTAMA PT PERIKANAN NUSANTARA (Persero) (FARIDA MOKODOMPIT):

Bismillahirrahmanirahim.

Mohon ijin Bapak Ketua, Bapak Pimpinan.

Mohon ijin Bapak Sekjen.

Kami dari Perikanan Nusantara Bapak Ketua, dari kami mendukung dan mensupport program-program dari Kementerian dan kami siap Bapak Sekjen dan Bapak Dirjen yang lainnya jika kami sebagai BUMN diminta untuk mengoperasikan atau pun mengoptimalkan asset-asset yang ada. Seperti selama ini yang memang sudah ditugaskan kepada kami sebagai BUMN. Seperti itu Bapak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, dari Perindo.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO) (FATAH SETIAWAN TOPOBROTO):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat, yang mulia Bapak Pimpinan Komisi IV DPR RI, Dan Bapak, Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami muliakan, Yang terhormat Bapak Sekjen, Bapak Irjen, Bapak-bapak Dirjen, Eselon I dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami dari Perum Perikanan Indonesia pada prinsipnya kami siap mendukung semua program KKP Pak. Dan kami juga siap mengoptimalkan seandainya ada asset-asset KKP yang bisa dikerjakan oleh kami, dititipkan oleh kami, kami siap untuk mengoptimalkan Pak. Tadi mohon maaf kalau misalnya ada yang belum bisa dioptimalkan kami siap untuk optimalkan.

Demikian Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ada tidak contohnya yang akan dioptimalkan, supaya Sekjen dengar.

**DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)
(FATAH SETIAWAN TOPOBROTO):**

Kemarin mungkin yang ada sedikit Pak, temuan dari BPK Pak, mungkin itu saya sudah lihat bahwa ini kemarin dari tempatnya Bapak Irjen sudah ditindaklanjuti juga Pak. Ada temuan mengenai Tambat Labuh, tapi sudah kami sampaikan kepada BPKP untuk membuat kajiannya Pak, baik dari tempat kami maupun dari tempatnya Kementerian Kelautan.

KETUA RAPAT:

Tambat Labuh itu yang mungut siapa.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO):

Permulaan ada di tempatnya Perindo, kemudian ke KKP dan temuan dari.

KETUA RAPAT:

Tahun berapa pindahanya?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO):

2019 Pak.

KETUA RAPAT:

Kenapa bisa pindah?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (PERSERO):

Saya persisnya waktu itu saya belum ada disitu Pak.

KETUA RAPAT:

Oke, Bapak tidak tahu silakan Bapak Irjen. Kita cari solusi jalan terbaik ini, dimatikan mic-nya.

IRJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Ketua.

Ketua yang kami hormati.

Mengenai Tambat Labuh Bapak Ketua dan Bapak, Ibu sekalian. Asetnya itu milik KKP ini dasar BPK merekomendasikan agar di serahkan kepada KKP Kembali. Tapi dalam PP Pengatur Pendirian Perindo Tupoksi mereka itu ya itu.

KETUA RAPAT:

Oh begitu.

IRJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Kemudian pernah juga ada penyerahan semacam pengelolaan antara Sekjen KKP jaman Bapak Galwin saat itu dengan Dirutnya Perindo Bapak Agus Suherman. Jadi ada dua dasar pijakan bagi Perindo mengelola Tambat Labuh, satu PP Pendiannya.

KETUA RAPAT:

Sekjennya bukan Galwin dong.

IRJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Waktu dibuatnya kesepakatan itu Pak.

KETUA RAPAT:

Tahun berapa itu?

IRJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Tahun berapa sekitar.

KETUA RAPAT:

2010.

IRJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Kurang lebih gitu Pak.

Jadi sampai sekarang ini masih kita mintakan pendapat dari BPKP Bapak.

KETUA RAPAT:

BPK apa BPKP?

IRJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

BPKP Pak, sebagai pihak yang dianggap netral, karena kan petunjuk BPK agar diminta pendapat pihak ketiga maka kita serahkan. Nah, kalau kita lihat dari segi fungsi, Pemerintah pasti regulator, BUMN operator. Ini lagi dicarikan solusi oleh BPKP, janjinya segera. Ini mungkin yang perlu bantuan dari Komisi IV DPR RI karena kan ada banyak pelabuhan Pak, yang KKP tidak punya tangan sampai kesana, sementara Perindo bisnisnya itu.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, sudah kalau gitu nanti kalau perlu Bapak Irjen mengatakan begitu perlu dimasukkan dalam kesimpulan rapat ya kita masukkan, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Satu hal lagi saya juga minta beberapa kali saya bicara dengan saudara Menteri Kelautan dan Perikanan “mbok kapal-kapal tangkap yang masih bagus, sudah inkrah, tidak ada masalah, daripada ditenggelamkan, dibakar, ya di kasihlah kepada kedua BUMN ini untuk cari uang”, supaya jangan minta dana terus dari Pemerintah. Ya Pak Irjen, setuju tidak begitu Bapak Irjen.

IRJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Nah, saya rasa Komisi IV DPR RI semua sangat mendukung. Ini kalau perlu nanti kalau kapalnya sudah inkrah ya kita keputusan dalam putusan rapat ya secara politis ya kiat putuskan, kan gitu ya.

Sudah siap belum?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua, boleh saya minta dijawab tadi terkait infrastruktur perikanan Pak. Pak Ketua ijin ya, saya minta data, ada datanya atau tidak itu.

IRJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Ijin Bapak Ketua.

Bapak Ichsan yang saya hormati.

Secara factual data yang eksplisit kami belum punya, cuman sekedar informasi sekitar 300-an Pak, yang memang tidak berfungsi termasuk daerah. Nah, kendalanya ada dua yang pokok, satu meregulasi yang memberikan otoritas pengelolaan pelabuhan perikanan itu pada provinsi Pak, bukan pada pusat. Provinsi terhambat pada tidak tersedianya dana SDM yang cukup, ini masalah. Nah, yang kedua hambatannya mohon maaf kebijakan Menteri kami yang lama untuk pembangunan rehabilitasi di serahkan kepada PUPR, tapi komunikasi tidak di barengin dengan ada surat resmi, seperti itu saja sehingga akhirnya begini jadinya. Nah, pada saat Bapak Edhy Prabowo sebagai Menteri memang ada agenda Pak, untuk merevitalisasi ini cuman sampai sekarang ini karena kita fokus kepada pemberdayaan tambak budidaya udang Pak.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi gini, kalau saya lihat kadang-kadang kendalanya adalah provinsi dalam mengalokasikan APBD untuk kelautan sangat kecil sekali. Ini kalau saya tidak salah ini, kalau saya tidak salah saya masih ingat, saya ke Batam keluhan kepala dinas kepulauan Riau APBD-nya cuman Rp7 miliar. Terus untuk apa bicara Kepri, wilayah kepulauan tapi ya seperti itu.

Kalau sudah tidak ada lagi untuk mempercepat waktu saya bacakan kesimpulan rapat.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 per 11 September 2020 sebesar Rp2.767.232.120.899,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 54,44% dari pagu anggaran sebesar Rp5.082.831.010.000,00 (lima triliun delapan puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sepuluh ribu rupiah). Untuk itu, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan percepatan kinerja program dan kegiatan dengan meningkatkan penyerapan anggaran Tahun 2020 secara optimal, agar masyarakat sektor kelautan perikanan dapat merasakan kehadiran bantuan Pemerintah secara cepat, sesuai dengan target dan harapan di masa pandemi COVID-19.

Anggota?

Pemerintah?

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar Rp6.652.139.393.000,00 (enam triliun enam ratus lima puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp497.646.140.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp86.767.955.000,00 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- c. **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**, sebesar Rp763.577.487.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- d. **Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya**, sebesar Rp1.212.740.404.000,00 (satu triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat ribu rupiah);
- e. **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp1.078.052.922.000,00 (satu triliun tujuh puluh delapan miliar lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp431.704.028.000,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat juta dua puluh delapan ribu rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut**, sebesar Rp455.357.175.000,00 (empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h. **Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp1.522.573.626.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
- i. **Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan**, sebesar Rp603.719.656.000,00 (enam ratus tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Anggota?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Cek dulu angkanya sama Bapak Sekjen apakah sesuai atau tidak.

KETUA RAPAT:

Jangan ngatur, diam.

Saya tanya Anggota setuju tidak?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Makanya saya mau kasih komentar.

KETUA RAPAT:

Eggak, saya mau tanya Anggota setuju tidak?

Bapak Sekjen bagaimana setuju tidak kan gitu, paham. Mau pindah Komisi XIII?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu alokasi anggaran Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp3.486.000.000.000,00 (tiga triliun empat ratus delapan puluh enam miliar rupiah), dengan rincian:
 - a. Berdasarkan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No. B.451/MENKP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp3.286.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh enam miliar rupiah) yang peruntukannya, antara lain untuk merealisasikan Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).
 - b. Berdasarkan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No. B.326/MENKP/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) yang peruntukannya untuk Sarana prasarana Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) dan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di 100 kawasan.

Anggota?

Pemerintah?

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dengan rincian:
 - a. DAK Provinsi, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - b. DAK Kabupaten/Kota, sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah).

Selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan bahan terkait pemilihan menu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 dari Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Komisi IV DPR RI, selambat-lambatnya bulan Desember 2020.

Kok lama sekali bulan Desember, selambat-lambatnya bulan Desember, kok lama sekali. Alasannya apa? Saya mintanya selambat-lambatnya bulan November, bukannya Oktober sudah masuk.

IRJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Ijin Pak Ketua, mereka kan perlu bikin rencana kegiatan Pak Ketua, biasanya masuknya pada November, biasanya. Tapi kami upayakan nanti kalau bisa secepat mungkin.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Janganlah sudah awal bulan Desember saja. Enggak, kadang-kadang kan daerah ini disuruh buat ya gampanglah *copy paste* sajalah.

Anggota?

Pemerintah?

IRJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Masih ada, tidak ada lagi? Oke.

Kalau tidak ada Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum menutup Rapat Kerja hari ini kami persilakan saudara Sekjen untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Kerja hari ini.

Silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami muliakan.

Terima kasih atas kritik, saran, masukan kepada kami. Mudah-mudahan dan kami bertekad untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Ini salah satu Rapat Kerja yang agak paling cepat dibandingkan dengan yang lain.

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini, atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, ada kehilafan. Dengan mengucapkan *alhamdulillah* *rabbi'l'amin* Rapat Kerja ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.11 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Drs. Achmad Agus Thomy
196508171988031002